



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Tuntunan dan Bimbingan-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu fondasi untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun komponen-komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dibuat sebagai media pertanggungjawaban kinerja yang mencakup informasi Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun pertama masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sebagai wujud komitmen moral terhadap amanah yang diemban maka LKIP Tahun 2025 secara jujur, transparan dan akuntabel menginformasikan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 sekaligus menjadi input bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2029 dalam mengemban amanah 5 (lima) tahun kedepan.

Walaupun LKIP ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2024-2026, capaian program dasa cita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2025-2029 juga dilaporkan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja Gubernur dan Wakil



Gubernur Periode 2025-2029. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa beberapa program dasa cita telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Untuk itu segala kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaannya. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 menjadi media informasi tentang Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bingkai spirit **“AYO BANGUN NTT”**.

Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya kita bersama dalam membangun Nusa Tenggara Timur tercinta.



Kupang, Maret 2026
Gubernur Nusa Tenggara Timur

E. Melkiades Laka Lena



EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*) perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada setiap akhir tahun anggaran. LKIP adalah penjabaran dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Sebagai suatu kewajiban organisatoris, LKIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 disusun sebagai media pertanggungjawaban atas komitmen yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Adapun Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai RPJMD 2025-2029 yaitu **“NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEHJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**. Visi tersebut dijabarkan dalam 5 Misi, 7 Pilar dan 10 Dasa Cita. Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut

1. Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU);
2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT);
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS);
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (SEJAHTERA);
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN).



7 Pilar pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Berkelanjutan;
2. Pemberdayaan Komunitas;
3. Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan;
4. Kesehatan;
5. Pendidikan;
6. Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia;
7. Kolaborasi.

Program-program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dasa Cita), yaitu:

1. Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman;
2. Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal;
3. Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal;
4. Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat;
5. Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting;
6. Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan;
7. Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera;
8. Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin;
9. Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar;
10. Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama.

Visi yang telah dijabarkan melalui misi, pilar dan dasa cita diimplementasikan melalui 124 program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

LKIP Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sesuai tujuan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



TABEL
CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SKALA ORDINAL
1.	Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera Dan Berkeadilan Sosial	165,78	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Beserta Pengolahan Produk Untuk Meningkatkan Nilai Tambah"	112,97	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Peranan Pariwisata Untuk Mendukung Perekonomian"	743,34	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Investasi Dan Neraca Perdagangan"	144,44	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 4 "Terciptanya Lapangan Kerja Dan Meningkatkan Kesempatan Kerja"	68,08	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 5 " Meningkatkan Daya Beli Masyarakat"	90,39	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 6 "Menurunnya Kemiskinan Masyarakat"	96,67	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 7 "Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antara Kelompok Masyarakat"	102,42	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 8 "Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah"	96,05	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 9 "Terjaminnya Kesenjangan Gender Dan Perlindungan Anak, Disabilitas Dan Inklusi Sosial"	99,76	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 10 "Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan"	103,71	Sangat Berhasil
2.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	98,47	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM Nusa Tenggara Timur yang Berdaya Saing"	99,78	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan"	97,16	Sangat Berhasil



3.	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayaan Dan Mitigasi Bencana	84,89	Berhasil
	Sasaran Strategis 1 "Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar"	91,46	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah"	106,28	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Lingkungan"	56,93	Cukup Berhasil
4.	Tujuan : Mewujudkan Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	106,03	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis"	106,03	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN		113,79	SANGAT BERHASIL

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2025 dikategorikan **SANGAT BERHASIL**. Hal ini dapat terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran dari 4 (empat) tujuan yang mencapai 113,79%. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala yang bersifat eksternal dan internal. Oleh karena itu peran serta dan partisipasi masyarakat dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) mutlak diperlukan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini.

Akhirnya, dalam semangat kolaboratif saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan untuk membangun daerah kita tercinta dalam bingkai spirit **"AYO BANGUN NTT"**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Sumber Daya Aparatur	2
1.4. Sistematika Penyusunan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis	5
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	5
2.1.2. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Pengukuran Kinerja	17
3.1.1 Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial	18
3.1.2. Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	52
3.1.3. Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Mitigasi Bencana	67
3.1.4. Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	76
3.2. Capaian Dasa Cita	92
3.3. Akuntabilitas Keuangan	95
BAB IV PENUTUP	102
4.1. Penutup	102
4.2. Rencana Tindak Lanjut	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Berdasarkan Golongan Kepangkatan	2
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Berdasarkan Jabatan Struktural	2
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Berdasarkan Jenjang Pendidikan	3
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Berdasarkan Nama Jabatan	3
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	5
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Gubernur Nusa Tenggara Timur	8
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 3.2	Target dan Capaian Indikator Kinerja	19
Tabel 3.3	Target dan Capaian Indikator Kinerja	21
Tabel 3.4	Target dan Capaian Indikator Kinerja	24
Tabel 3.5	Neraca Nilai Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (juta US\$) Januari 2024–Desember 2025	28
Tabel 3.6	Target dan Capaian Indikator Kinerja	30
Tabel 3.7	Target dan Capaian Indikator Kinerja	33
Tabel 3.8	Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan menurut Kabupaten/Kota	34
Tabel 3.9	Target dan Capaian Indikator Kinerja	37
Tabel 3.10	Target dan Capaian Indikator Kinerja	41
Tabel 3.11	Target dan Capaian Indikator Kinerja	43
Tabel 3.12	Target dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025	44
Tabel 3.13	Target dan Capaian Indikator Kinerja	45
Tabel 3.14	Target dan Capaian Indikator Kinerja	48
Tabel 3.15	Rincian Program, Anggaran dan Realisasi Tujuan 1	51
Tabel 3.16	Target dan Capaian Indikator Kinerja	52
Tabel 3.17	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2025	54
Tabel 3.18	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk NTT 15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025	56
Tabel 3.19	Harapan Lama Sekolah Penduduk NTT 15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025	59
Tabel 3.20	Program, anggaran dan realisasi	60
Tabel 3.21	Target dan Capaian Indikator Kinerja	61

Tabel 3.22	Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2025	62
Tabel 3.23	Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2024	64
Tabel 3.24	Program, anggaran dan realisasi.....	66
Tabel 3.25	Target dan Capaian Indikator Kinerja.....	67
Tabel 3.26	Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi) Strategis 1 Tujuan 3	70
Tabel 3.27	Target dan Capaian Indikator Kinerja.....	71
Tabel 3.28	Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi) Strategis 2 Tujuan 3	72
Tabel 3.29	Target dan Capaian Indikator Kinerja.....	73
Tabel 3.30	Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi) Strategis 3 Tujuan 3	75
Tabel 3.31	Target dan Capaian Indikator.....	76
Tabel 3.32	Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi) Strategis 1 Tujuan 4	89
Tabel 3.33	Capaian Tujuan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025	92
Tabel 3.34	Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran pada 34 Perangkat Daerah dan 1 Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Tahun 2025.....	96
Tabel 3.35	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran 34 Perangkat Daerah dan 1 Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Tahun 2025.....	99
Tabel 4.1	Capaian Tujuan dan Sasaran	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sumber Pertumbuhan beberapa Lapangan Usaha Tahun 2023-2025 (c-to-c) (%)	20
Gambar 3.2 Realisasi Investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025	25
Gambar 3.3 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah (Provinsi /Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya yang disebut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimiliki. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ini adalah memberi informasi kepada masyarakat atas tugas dan tanggung jawab pemerintah dari sisi perencanaan, hingga

pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun serta hasilnya.

Adapun tujuan penyusunan LKIP yaitu agar masyarakat mengetahui hasil kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2026, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan di daerah atas perencanaan yang disusun, pelaksanaan hingga hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah.

1.3. Sumber Daya Aparatur

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada data di bawah ini:

1. Golongan Kepangkatan

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Jumlah PNS Seluruh berdasarkan Golongan Kepangkatan			Jumlah/ Total
Golongan	Laki-laki	Perempuan	
I/a	1	0	1
I/b	1	0	1
I/c	7	0	7
I/d	16	0	16
II/a	76	63	139
II/b	58	16	74
II/c	198	166	364
II/d	284	131	415
III/a	1.349	1.197	2.546
III/b	1.002	1.152	2.154
III/c	803	858	1.661
III/d	1.427	1.974	3.401
IV/a	676	674	1.350
IV/b	355	341	696
IV/c	173	176	349
IV/d	9	5	14
IV/e	2	5	7
Total	6.437	6.758	13.195

2. Jabatan Struktural

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Berdasarkan Jabatan Struktural

Jumlah Pejabat Struktural per Eselon			Jumlah/ Total
Eselon	Laki-laki	Perempuan	
I-a	0	0	0
I-b	0	0	0
II-a	26	7	33
II-b	5	2	7

Jumlah Pejabat Struktural per Eselon			Jumlah/ Total
Eselon	Laki-laki	Perempuan	
III-a	106	58	164
III-b	69	20	89
IV-a	206	149	355
IV-b	0	1	1
Total	412	237	649

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah PNS Seluruh Menurut Pendidikan			Jumlah/ Total
Jenjang	Laki-laki	Perempuan	
SD	26	2	28
SLTP	44	4	48
SLTA	967	436	1.403
D1/Diploma 1	2	10	12
D2/Diploma 2	11	16	27
D3/Diploma 3	395	694	1.089
D4/Diploma 4	165	168	333
S1/Strata 1	4.487	5.136	9.623
S2/Strata 2	337	291	628
S3/Strata 3	3	1	4
Total	6.437	6.758	13.195

4. Nama Jabatan

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Berdasarkan Nama Jabatan

Jumlah PNS Seluruh berdasarkan Jenis Jabatan			
Nama Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah/ Total
Struktural	412	237	649
Fungsional Umum	2.739	2.198	4.937
Fungsional Tertentu	3.286	4.323	7.609
Total	6.437	6.758	13.195

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I.**PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sistematisa Penyusunan.

BAB II.**PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III.**AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja.

BAB IV.**PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan tindak lanjut (aksi) di masa yang mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera Dan Berkeadilan Sosial	Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Beserta Pengolahan Produk Untuk Meningkatkan Nilai Tambah"	Pertumbuhan PDRB
		Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Peranan Pariwisata Untuk Mendukung Perekonomian"	Kontribusi Pariwisata pada PDRB
			Nilai Tambah Ekonomi Kreatif
		Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Investasi Dan Neraca Perdagangan"	Realisasi nilai investasi
			Neraca perdagangan
		Sasaran Strategis 4 "Terciptanya Lapangan Kerja Dan Meningkatkan Kesempatan Kerja"	Tingkat pengangguran terbuka

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
		Sasaran Strategis 5 "Meningkatkan Daya Beli Masyarakat"	Pengeluaran per kapita
			Inflasi
		Sasaran Strategis 6 "Menurunnya Kemiskinan Masyarakat"	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
		Sasaran Strategis 7 "Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antara Kelompok Masyarakat"	Indeks Gini
		Sasaran Strategis 8 "Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah"	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah
		Sasaran Strategis 9 "Terjaminnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak, Disabilitas Dan Inklusi Sosial"	Indeks Pembangunan gender
		Sasaran Strategis 10 "Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan"	Skor Pola Pangan Harapan
2.	Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM Nusa Tenggara Timur yang Berdaya Saing"	Indeks Pembangunan Manusia
			Rata-rata Lama Sekolah
			Harapan Lama Sekolah
		Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan"	Usia Harapan Hidup
			Prevalensi Stunting
3.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayaan Dan Mitigasi Bencana	Sasaran Strategis 1 "Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar"	Presentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap
			Ratio elektrifikasi
		Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah"	Indeks kualitas lingkungan hidup
		Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Lingkungan"	Indeks resiko bencana
4.	Mewujudkan Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis"	Indeks Reformasi Birokrasi
			Opini BPK
			Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik
			Indeks Kepuasan Masyarakat
			Indeks Demokrasi Indonesia

2.1.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur. Dengan demikian Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Penetapan kinerja tersebut diharapkan akan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi agar lebih baik, sehingga pelaksanaan kegiatan terarah dengan baik.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Gubernur Nusa Tenggara Timur

TUJUAN I			
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Serta Pengolahan Produk Untuk Meningkatkan Nilai Tambah	Pertumbuhan PDRB (%)	4,55-5,35
2.	Meningkatnya Peranan Pariwisata Untuk Mendukung Perekonomian	Kontribusi Pariwisata Pada PDRB (%)	7,77
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)	85.119,30
3.	Meningkatnya Investasi dan Neraca Perdagangan	Realisasi Nilai Investasi (Rp. Triliun)	5,7
		Neraca Perdagangan (Rp. Triliun)	-27,64
4.	Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,51-2,35
5.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Rp)	7,762
		Inflasi	3,5±1
6.	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan (%)	19,35-18,85
7.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Kelompok Masyarakat	Indeks Gini (Poin)	0,337-0,335
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Ratio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	25,8
9.	Terjaminnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak, Disabilitas dan Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Gender (%)	94
10.	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	68,25

PROGRAM TUJUAN I

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
1	2	3
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.272.909.740,00
2	Penanganan Kerawanan Pangan	82.278.000,00
3	Pengawasan Keamanan Pangan	2.000.000
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.974.146.233,00
5	Penyuluhan Pertanian	9.258.808.000,00
6	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	53.893.090,00
7	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	484.098.500,00
8	Pemasaran Pariwisata	1.464.599.800,00
9	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	194.709.600,00
10	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.950.000.000,00
12	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	520.004.000,00
11	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	515.648.968,00
12	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	30.882.900,00
13	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.992.969.060,00
14	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.950.000.000,00
15	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	275.000.000,00
16	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	280.810.000,00
17	Pengembangan UMKM	125.000.000,00
18	Hubungan Industrial	10.873.737.180,00
19	Pengawasan Ketenagakerjaan	69.000.000,00
20	Penempatan Tenaga Kerja	111.691.000,00
21	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2.694.822.608,00
22	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.105.177.392,00
23	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.582.000,00
24	Pengelolaan Perikanan Tangkap	66.259.468,00
25	Pengelolaan Perikanan Budidaya	16.900.000,00
26	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	42.216.700,00
27	Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.946.800
28	Penataan Desa	4.609.000,00
29	Administrasi Pemerintah Desa	21.004.500,00
30	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	28.443.822.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
1	2	3
31	Pemberdayaan Sosial	1.366.000.000,00
32	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	188.395.500,00
33	Rehabilitasi Sosial	17.410.628.164,00
34	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5.072.427.420,00
35	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	158.215.340,00
36	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	260.590.380,00
37	Promosi Penanaman Modal	9.995.200,00
38	Pelayanan Penanaman Modal	288.704.020,00
39	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	310.000.000,00
40	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	17.272.800,00
41	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	74.750.300,00
42	Perlindungan Perempuan	637.139.210,00
43	Peningkatan Kualitas Keluarga	200.045.300,00
44	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	101.062.600,00
45	Pemenuhan Hak Anak	326.189.320,00
46	Perlindungan Khusus Anak	738.979.204,00
47	Pengendalian Penduduk	37.078.900
48	Pembinaan Keluarga Berencana	217.568.398,00
49	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	20.134.999,00
50	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	662.892.773,00
51	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22.127.500
52	Perekonomian dan Pembangunan	398.480.900,00
53	Kebijakan Administrasi Pembangunan	149.356.860
54	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.779.709.000,00
55	Pengelolaan Pendapatan Milik Daerah	9.660.981.795,00
TOTAL		116.998.252.422,00

TUJUAN II			
MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	66,65-67
		Rata-rata Lama Sekolah (Poin)	7,93
		Harapan Lama Sekolah (Poin)	14,6
2.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (Poin)	68
		Prevalensi Suntung (%)	33,1

PROGRAM TUJUAN II

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
1	2	3
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	145.926.628.261,00
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	211.215.903.580,00
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	40.000.000,00
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	34.660.000,00
5	Pengelolaan Pendidikan	669.724.701.529,00
6	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	114.735.300,00
7	Pengembangan Bahasa dan Sastra	445.529.400,00
8	Pengembangan Kebudayaan	2.141.477.700,00
9	Pengembangan Kesenian Tradisional	5.112.294.400,00
10	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	633.399.200,00
11	Pengelolaan Permuseuman	3.372.156.000,00
12	Pembinaan Perpustakaan	3.860.928.692,00
13	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	95.724.300,00
14	Pengelolaan Arsip Daerah	204.661.700,00
15	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	59.515.900,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
16	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	7.550.000.000,00
17	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	19.300.000.000,00
18	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	900.000.000,00
19	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	500.000.000,00
20	Pelayanan Pencatatan Sipil Di Provinsi	1.000.000.000,00
TOTAL		1.072.232.315.962,00

TUJUAN III MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP, KEWILAYAHAN DAN MITIGASI BENCANA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Memperkuat Insfrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	100
		Ratio Elektrifikasi	94
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,95
3.	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah Dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana	138

PROGRAM TUJUAN III

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
1	2	3
1	Penanganan Bencana	89.006.000,00
2	Penanggulangan Bencana	4.238.956.460,00
3	Pengelolaan Aspek Kegeologian	260.874.050,00
4	Pengelolaan Mineral dan Batubara	481.696.840,00
5	Pengelolaan Energi Terbarukan	377.640.750,00
6	Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.097.765.860,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
1	2	3
7	Pengelolaan Sumber Daya Air	753.356.350,00
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.940.670.172,00
9	Penyelenggaraan Jalan	42.042.381.881,00
10	Pengembangan Jasa Konstruksi	1.940.670.172,00
11	Pengembangan Perumahan	1.252.873.420,00
12	Pengembangan Kawasan Permukiman	200.000.000,00
13	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.059.329.828,00
14	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.369.989.150,00
15	Pengelolaan Pelayaran	6.033.463.136,00
16	Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	540.004.619,00
17	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	59.217.533,00
18	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.802.000,00
19	Pengelolaan Hutan	977.240.293,00
20	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1.850.000,00
21	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	6.238.170.000,00
	TOTAL	78.005.958.514,00

TUJUAN IV MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERORIENTASI PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL, ADAPTIF DAN KOLABORATIF			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Beorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	64-65
		Opini BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,5
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	90
		Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,4

PROGRAM TUJUAN IV

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
1	2	3
1	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	759.179.347,00
2	Kesejahteraan Rakyat	11.753.000.000,00
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	651.500.180,00
4	Kebijakan Pelayanan PBJ	5.417.915.972,00
5	Penataan Organisasi	1.063.570.202,00
6	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	53.180.865.781,00
7	Penyelenggaraan Pengawasan	3.593.819.561,00
8	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.702.649.008,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
9	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	81.181.023.800,00
10	Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	1.709.118.006,00
11	Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.772.570.333,00
12	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	177.562.200,00
13	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	171.575.700,00
14	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	2.286.712.830,00
15	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.649.483.900,00
16	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	156.098.000,00
17	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	299.893.000,00
18	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	872.221.500,00
19	Pengelolaan Perbatasan	900.000.000,00
20	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.230.947.871,00
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.847.327.942,00
22	Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.648.872.628,00
23	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	945.681.500,00
24	Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	35.000.000,00
25	Kepegawaian Daerah	2.370.264.766,00
26	Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.895.500.554,00
27	Pengelolaan Keuangan Daerah	666.067.114.372,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
28	Pelayanan Penghubung	1.038.065.880,00
TOTAL		870.377.534.833,00
Total Belanja Program Untuk Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025		2.137.614.061.731,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Penjabaran dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Pertanggungjawaban kinerja yang diperjanjikan tersebut disampaikan secara periodik melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari capaian sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi serta membandingkan dengan kinerja Tahun sebelumnya.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = [\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})] / \text{Rencana} \times 100\%$$

Atau,

$$(\text{Capaian Indikator Kinerja} = ((2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}) / \text{Rencana} \times 100\%)$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	NILAI ANGKA	KATEGORI CAPAIAN
1.	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
2.	$75\% \leq X < 85\%$	Berhasil
3.	$55\% \leq X < 75\%$	Cukup Berhasil
4.	$X < 55\%$	Belum Berhasil

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Hasil pengukuran atas IKU dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.1.1. Tujuan 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL

Tujuan misi ini merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*stakeholder*) dengan pendekatan berkelanjutan

yang merujuk pada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Beserta Pengolahan Produk Untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Sasaran strategis ini mencakup satu (1) indikator sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2024	2025			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Pertumbuhan PDRB	%	3,73	4,55-5,35	5,14	112,97-96,07	4,75-5,65	108,21-90,97
Capaian						112,97-96,07		

Sumber data: BPS NTT 2025, diolah

Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB

a. Capaian Target Pertumbuhan PDRB

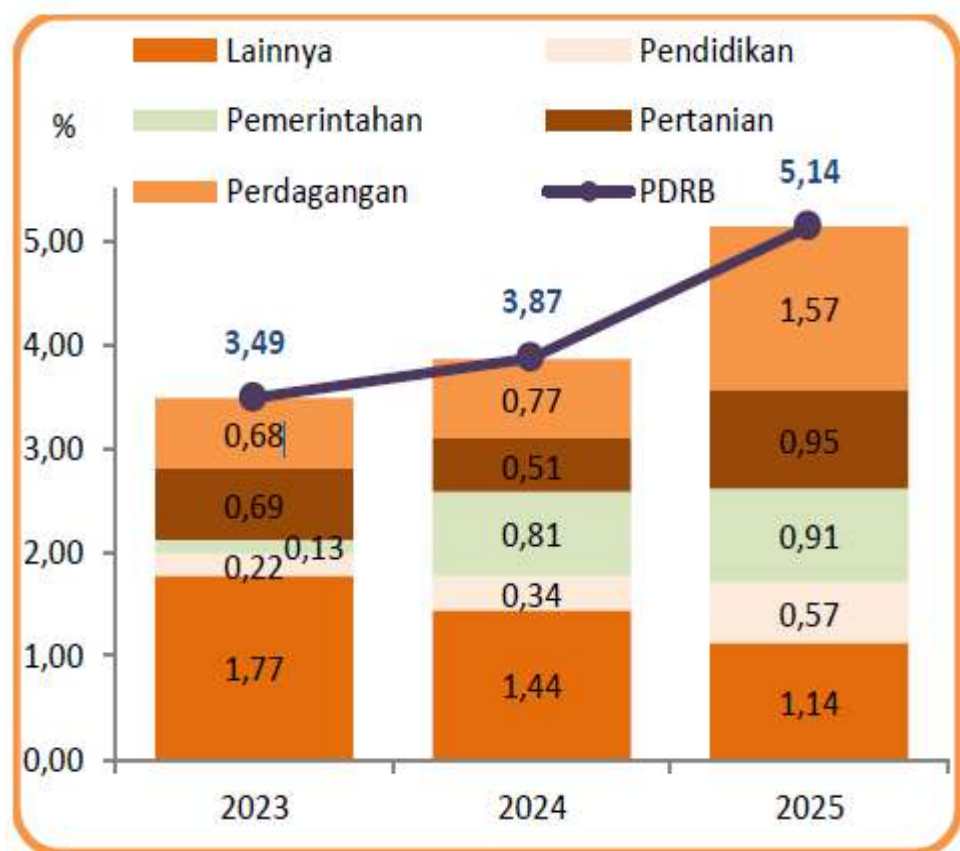
Pada Tahun 2025 realisasi pertumbuhan PDRB adalah sebesar 5,14% atau dengan capaian sebesar 112,97% dari target pesimis yang ditetapkan sebesar 4,55% dan sebesar 96,07% dari target optimis yang ditetapkan sebesar 5,35%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar 3,73%, pertumbuhan PDRB meningkat sebesar 1,27%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD maka, capaian terhadap target pesimis sebesar 108,21% dan capaian terhadap target optimis sebesar 90,97%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 tumbuh sebesar 5,14%. Tiga besar pertumbuhan ekonomi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,43%, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 10,75% dan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,97%.

Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 1,57%. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,95% dan diikuti oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi sebesar 0,91%. Sumber Pertumbuhan beberapa Lapangan Usaha Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 1

Gambar 3.1
Sumber Pertumbuhan beberapa Lapangan Usaha
Tahun 2023-2025 (c-to-c) (%)



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Prov NTT No. 11/02/53/Th. XXIX, 5 Februari 2026

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian indikator pertumbuhan PDRB untuk sasaran strategis **"Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan"** adalah sebesar **112,97% (target optimis)** dengan kategori **Sangat Berhasil**, bahkan melampaui target pada tahun 2025.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Peranan Pariwisata Untuk Mendukung Perekonomian

Sasaran ini mencakup 2 (dua) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2024	2025			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Kontribusi Pariwisata pada PDRB	%	5,83	7,77	7,71	99,23	7,79	98,97
2.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Juta	934.730	85.119,30	1.181.000	1.387,46	89.715,74	1.316,37
Rata-rata Capaian						743,34		

Sumber: LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025

Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pariwisata pada PDRB

a. Capaian target Kontribusi Pariwisata pada PDRB

Kontribusi Pariwisata pada PDRB pada tahun 2025 adalah sebesar 7,71% atau dengan capaian sebesar 99,23% dari target yang ditetapkan sebesar 7,77%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD, maka capaiannya sebesar 98,97%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tercatat meningkat sebesar 1,88%.

Kontribusi PDRB sektor pariwisata diperoleh dari komponen sektor akomodasi, makan-minum, transportasi dan sektor jasa lainnya terhadap PDRB harga berlaku.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja sektor ini antara lain:

1) Peningkatan Aktivitas Wisata dan Pergerakan Wisatawan

Kenaikan kontribusi dibanding tahun 2024 (naik 1,88%) menunjukkan adanya peningkatan aktivitas wisata, baik domestik maupun mancanegara. Hal ini berdampak langsung pada:

- Kenaikan okupansi hotel



- Peningkatan transaksi sektor makan-minum
 - Bertambahnya pergerakan transportasi wisata.
- 2) Penguatan Destinasi Unggulan
Destinasi prioritas seperti Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo tetap menjadi magnet utama wisatawan. Pengembangan infrastruktur dan promosi destinasi tersebut meningkatkan kontribusi sektor akomodasi dan jasa pendukung terhadap PDRB.
 - 3) Integrasi dengan Sektor Ekonomi Kreatif
Keterkaitan antara pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif (kuliner, kriya/tenun, pertunjukan budaya) memperbesar *multiplier effect* terhadap ekonomi daerah.
 - 4) Keterbatasan Infrastruktur dan Konektivitas
Beberapa wilayah destinasi belum sepenuhnya terhubung dengan akses transportasi yang memadai, sehingga potensi kontribusi belum optimal.
 - 5) Lama Tinggal Wisatawan Relatif Pendek
Jika wisatawan hanya singgah dalam waktu singkat, belanja yang dikeluarkan terbatas, sehingga kontribusi terhadap PDRB tidak maksimal.
 - 6) Ketergantungan pada Destinasi Tertentu
Kontribusi masih terpusat pada destinasi unggulan tertentu, belum merata ke seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Hal ini membatasi perluasan basis kontribusi sektor.
 - 7) Kapasitas SDM dan Standar Layanan
Kualitas pelayanan, kompetensi tenaga kerja, dan standar usaha pariwisata mempengaruhi daya saing destinasi.
 - 8) Kondisi Ekonomi Nasional dan Global
Daya beli wisatawan, nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi global turut mempengaruhi jumlah dan pola belanja wisatawan.

2. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)

a. Capaian Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)

Target Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Tahun 2025 adalah sebesar



85.119,30 juta, realisasi 1.181.000 juta atau dengan capaian sebesar 1.387,46% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD maka, capaian Nilai Tambah Ekonomi Kreatif adalah sebesar 1.316,37%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah jauh melampaui target yang telah ditentukan, mencerminkan pertumbuhan yang sangat baik di sektor ini.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja sektor ini antara lain:

- 1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memprioritaskan peningkatan produksi industri pengolahan melalui regulasi yang mendukung investasi kondusif dan penyediaan infrastruktur.
- 2) Pemanfaatan teknologi digital mulai berkembang di sektor kreatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
- 3) Sinergi dengan sektor pariwisata seperti *Tour de EnTeTe* 2025 dan berbagai festival pariwisata dan ekonomi kreatif di kabupaten/kota sepanjang Tahun 2025 memberikan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan permintaan produk industri lokal.

4) Ketersediaan Teknologi dan Inovasi

Pemanfaatan teknologi modern menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah bagi produk kreatif. Adopsi teknologi digital dalam pemasaran melalui *platform e-commerce* memungkinkan produk ekonomi kreatif Nusa Tenggara Timur menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional. Selanjutnya pengembangan produk berbasis budaya dan kearifan lokal, seperti tenun ikat Sabu Raijua atau kerajinan tradisional lainnya, menjadi daya tarik unik yang mendorong peningkatan permintaan.

5) Kolaborasi dan Kemitraan

Kemitraan yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas kreatif memainkan peran penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur. Kolaborasi dengan industri dan lembaga swasta yang telah dilakukan memungkinkan pelaku ekonomi kreatif mengakses pasar yang lebih

luas serta memperluas distribusi produk mereka.

6) Akses Pasar dan Promosi

Kinerja ekonomi kreatif yang telah capai sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha yang sudah semakin baik dalam mengakses pasar dan melakukan promosi yang efektif. Hal ini ditunjang dengan peran pariwisata sebagai pasar ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kedua indikator terhadap target tahun 2025 adalah sebesar **743,34%**. Capaian ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tantangan dalam memenuhi target kontribusi pariwisata, sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Investasi Dan Neraca Perdagangan

Sasaran strategis ini mencakup 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2024	2025			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Realisasi nilai investasi	Triliun	4,217	5,7	4,861	85,28	17,2	28.26
2.	Neraca perdagangan	Triliun	0.039 (surplus)	-27,64 (defisit)	0.996 (surplus)	203.60	-23,05 (defisit)	204.32
Rata-rata Capaian						144,44		

Sumber data: BPS NTT 2025 dan Bappelitbangda Provinsi NTT, diolah

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Nilai Investasi

a. Capaian target Realisasi Nilai Investasi

Pada tahun 2025, realisasi nilai investasi di Nusa Tenggara Timur mencapai Rp4,861 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,7 triliun, atau sebesar 85,28 % dari target tahunan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar Rp 17,2 triliun, maka capaian terhadap target akhir ini baru mencapai 28,26 %. Capaian yang masih jauh dari target akhir menunjukkan perlunya upaya intensif untuk menarik investasi lebih besar.

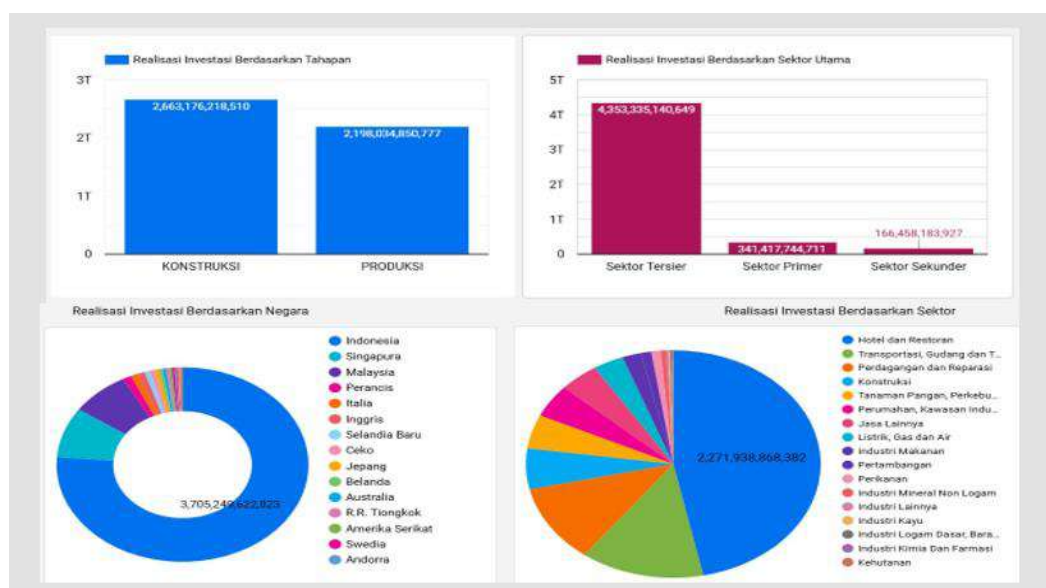


Secara nasional target realisasi investasi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebesar Rp4,69 triliun, Realisasi Investasi Tahun 2025 (Januari – Desember) adalah Rp4,861,211,069,287 (103,7%), dengan jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebanyak 1.426 perusahaan, ada 13.999 proyek/kegiatan investasi. Jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.554 orang (TKI: 8.462 orang TKI dan TKA: 92 orang. Jadi capaian kinerjanya melampaui target (103,7%).

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA): Rp1.155.961.446.464 dengan jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM ada 296 perusahaan, jumlah proyek/kegiatan usaha 2.349 proyek dengan jumlah penyerapan tenaga sebanyak 1.868 orang (TKI: 1.780 orang dan TKA: 88 orang dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN): Rp3.705.249.622.823, dengan jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM: 1.132 perusahaan, ada 11.650 proyek/kegiatan investasi, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.686 orang (TKI: 6.682 orang dan TKA: 4 orang).

Gambar 3.2

Realisasi Investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025



Sumber data: LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2025

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Beberapa faktor penyebab capaian kinerja realisasi investasi di Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, antara lain:



1) Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar

Keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan telekomunikasi di beberapa wilayah menyebabkan investor kurang tertarik untuk menanamkan modal di Nusa Tenggara Timur. Keterbatasan infrastruktur dengan kondisi geografis Nusa Tenggara Timur turut mengakibatkan tingginya biaya logistik. Hal ini turut menjadi faktor penghambat investasi di daerah.

2) Kapasitas Kelembagaan dan Birokrasi

Meskipun pemerintah daerah berupaya mendorong investasi, birokrasi dan perizinan yang belum sepenuhnya efektif terimplementasi di lapangan menyebabkan proses investasi berjalan lambat.

3) Keterbatasan SDM Pelayanan

Kualitas dan kuantitas SDM pelayanan perizinan yang terbatas serta kurang memahami regulasi mengakibatkan prosedur perizinan berbelit-belit dan memperlambat proses keputusan investasi.

4) Kesenjangan SDM terampil

Kurangnya tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang relevan tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

5) Akses Permodalan Investor Lokal/UMKM

Kesulitan memperoleh akses pembiayaan dan modal kerja terutama bagi UMKM dan investor berskala kecil.

Selain faktor yang telah dijelaskan di atas, terdapat juga faktor penghambat lain dalam iklim investasi, yaitu:

1) Kualitas Regulasi Daerah

Kebijakan tidak konsisten, prosedur perizinan rumit dan kurangnya harmonisasi antar wilayah.

2) Promosi dan Informasi Investasi

Sosialisasi potensi tidak merata, platform informasi kurang aktif dan kurangnya komunikasi dengan investor.

3) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Dari 83 RDTR yang direncanakan, 23 RDTR telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, 35 belum menyusun, 25 RDTR sedang dalam proses penyusunan. dari 23 RDTR yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah, 13 RDTR telah terintegrasi dgn OSSS-RBA.

4) Keterbukaan Investasi

Akses data investasi terbatas dan kurang transparan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yaitu :

1) Penyelesaian RDTR Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur dan diintegrasikan dengan *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)*.

2) Pemetaan Potensi Unggulan

Identifikasi dan katalogisasi proyek investasi unggulan (*Ready-To-Offer*).

3) Penyusunan Perkada Insentif

Pembentukan regulasi daerah untuk fasilitas insentif investasi yang kompetitif.

4) Revisi Peraturan Daerah Penanaman Modal 2025

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 untuk kepastian investasi perlu diharmonisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

5) Peta Potensi Investasi Regional (PIR)

Penyediaan PIR dwi-bahasa untuk aksesibilitas investor global.

6) Pengembangan Materi Promosi dan IPRO serta Peningkatan SDM

Peningkatan kualitas materi promosi dan pelatihan reguler *Investment Promotion Officer*.

2. Neraca perdagangan

a. Capaian Target Neraca perdagangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Neraca Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 tercatat sebesar surplus 64,244 juta US\$. Dengan kurs rata-rata tahun 2025 sebesar Rp15.500 per US\$, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp0,996 triliun. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar defisit Rp27,64 triliun, maka realisasi menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target, dengan deviasi positif sekitar Rp28,636 triliun. Secara persentase, kinerja menunjukkan perbaikan sebesar 203,60% dari kondisi defisit yang

ditargetkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 2,507 juta US\$ atau setara Rp0,039 triliun, terjadi kenaikan 61,737 US\$ atau setara 0.957 triliun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar defisit Rp23,05 triliun, capaian tahun 2025 masih jauh melebihi target yaitu sebesar 204,32%.

Tabel 3.5
Neraca Nilai Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (juta US\$)
Januari 2024–Desember 2025

Bulan	Ekspor			Impor			Neraca		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2024	2,508	82,299	84,807	-	82,300	82,300	2,508	-0,001	2,507
Januari	0,004	6,209	6,212	-	4,431	4,431	0,004	1,778	1,781
Februari	0,235	5,692	5,927	-	0,247	0,247	0,235	5,445	5,680
Maret	0,259	5,478	5,737	-	4,279	4,279	0,259	1,199	1,458
April	0,168	4,638	4,806	-	4,982	4,982	0,168	-0,343	-0,176
Mei	0,162	7,487	7,649	-	9,491	9,491	0,162	-2,004	-1,842
Juni	0,130	5,743	5,873	-	3,180	3,180	0,130	2,563	2,693
Juli	0,155	5,695	5,851	-	0,192	0,192	0,155	5,504	5,659
Agustus	0,267	6,981	7,248	-	6,759	6,759	0,267	0,222	0,488
September	0,190	5,130	5,320	-	3,024	3,024	0,190	2,105	2,296
Oktober	0,201	9,805	10,006	-	0,480	0,480	0,201	9,324	9,526
November	0,344	8,911	9,255	-	16,542	16,542	0,344	-7,631	-7,287
Desember	0,393	10,531	10,924	-	28,693	28,693	0,393	-18,162	-17,769
2025	2,291	74,346	76,637	~0	12,393	12,393	2,291	61,953	64,244
Januari	0,128	5,945	6,073	-	0,138	0,138	0,128	5,806	5,935
Februari	0,263	5,766	6,029	-	0,219	0,219	0,263	5,547	5,810
Maret	0,185	5,542	5,727	-	1,749	1,749	0,185	3,794	3,978
April	0,165	5,814	5,978	-	0,115	0,115	0,165	5,698	5,863
Mei	0,178	7,465	7,643	-	1,384	1,384	0,178	6,082	6,259
Juni	0,095	4,291	4,385	~0	0,473	0,473	0,095	3,818	3,912
Juli	0,184	6,078	6,262	-	1,899	1,899	0,184	4,180	4,364
Agustus	0,240	6,372	6,612	-	0,908	0,908	0,240	5,464	5,704
September	0,214	7,009	7,223	-	2,393	2,393	0,214	4,616	4,830
Oktober	0,257	6,626	6,883	-	2,035	2,035	0,257	4,591	4,848
November	0,149	6,798	6,947	-	0,641	0,641	0,149	6,156	6,305
Desember	0,235	6,639	6,873	-	0,438	0,438	0,235	6,201	6,435

Catatan : ~0 : Nilai sangat kecil

Sumber Data : *Berita Resmi Statistik, BPS Prov NTT No. 08/02/53/Th.XXIX, 2 Februari 2026*

Berdasarkan tabel di atas, neraca perdagangan Nusa Tenggara Timur Januari–Desember 2025 mengalami surplus US\$ 64,24 juta yang berasal dari surplus sektor nonmigas sebesar US\$61,95 juta, dan surplus dari sektor migas senilai US\$ 2,29 juta. Surplus neraca perdagangan Tahun 2025 lebih disebabkan oleh kontraksi impor, bukan lonjakan ekspor signifikan, sehingga strategi ke depan perlu difokuskan pada penguatan daya saing ekspor agar surplus bersifat struktural dan berkelanjutan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Beberapa faktor penyebab capaian kinerja neraca perdagangan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, antara lain:



1) Penurunan Signifikan Nilai Impor

Faktor paling dominan adalah kontraksi impor nonmigas.

- Impor 2024: 82,300 juta US\$
- Impor 2025: 12,393 juta US\$
- Penurunan: $\pm 69,9$ juta US\$

Penurunan impor ini secara langsung memperbaiki keseimbangan perdagangan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh:

- Berkurangnya impor barang modal/proyek besar
- Penyesuaian belanja pemerintah atau investasi
- Efisiensi penggunaan barang impor
- Perubahan kebijakan atau kebutuhan pasar domestik

Kontraksi impor inilah yang menjadi kontributor utama terbentuknya surplus 2025.

2) Stabilitas Ekspor Nonmigas

Meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding 2024, nilai ekspor nonmigas tetap relatif stabil dan menjadi penopang utama perdagangan luar negeri daerah.

Hal ini menunjukkan:

- Daya saing komoditas unggulan daerah masih terjaga
- Permintaan pasar ekspor relatif stabil
- Struktur ekspor tidak mengalami gangguan signifikan

Dengan kata lain, surplus tidak terjadi karena lonjakan ekspor drastis, tetapi karena ekspor tetap stabil saat impor menurun.

3) Tidak Signifikannya Perdagangan Migas

Baik ekspor maupun impor migas relatif kecil, sehingga dinamika neraca perdagangan Nusa Tenggara Timur lebih dipengaruhi oleh sektor nonmigas.

Hal ini mencerminkan bahwa struktur perdagangan Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh komoditas nonmigas.

4) Faktor Eksternal Global

Beberapa faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi:

- Fluktuasi harga komoditas global
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar

- Kondisi ekonomi negara tujuan ekspor
- Gangguan rantai pasok global

Jika harga komoditas ekspor relatif stabil atau meningkat, maka hal tersebut mendukung keseimbangan perdagangan.

Untuk menjaga keberlanjutan surplus, kebijakan ke depan perlu difokuskan pada:

- 1) Penguatan daya saing ekspor
- 2) Hilirisasi komoditas unggulan
- 3) Diversifikasi pasar ekspor
- 4) Substitusi impor secara produktif

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis " **Meningkatnya Investasi Dan Neraca Perdagangan**" sebesar 144,44% dengan kategori **Belum Berhasil**.

Sasaran Strategis 4: Terciptanya Lapangan Kerja Dan Meningkatnya Kesempatan Kerja

Sasaran strategis ini mencakup satu (1) indikator sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Tingkat pengangguran terbuka	%	3,02 (Agustus 2024)	2,51-2,35	3,10	76,49-68,08	2,25-2,05	62,22-48,78
Capaian					76,49-68,08		

Sumber data: *BPS Provinsi NTT, November 2025*

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah tertentu. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

a. Capaian Target Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi tingkat pengangguran terbuka pada bulan November 2025 adalah sebesar 3,10% atau dengan capaian sebesar 76,49% dari target pesimis yang ditetapkan sebesar 2,51%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 2,35%, maka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 mencapai 68,08%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada bulan Agustus 2024, terdapat gap sebesar 0,08%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2025 maka capaian terhadap target pesimis sebesar 62,22% dan capaian terhadap target optimis sebesar 48,78%.

Realisasi TPT Nasional pada bulan November 2025 adalah sebesar 4,74%, turun sebesar 0,17% dari 4,91% pada Agustus 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi TTP Nasional, TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 lebih rendah 1,64%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Realisasi TPT tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan pengangguran dan penurunan penyerapan tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur. Lapangan kerja masih dominan di sektor informal, dengan sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian indikator kinerja adalah:

- 1) Rendahnya Kualitas SDM dan Keterampilan: banyak tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur didominasi lulusan pendidikan dasar, sementara lulusan SMK justru tercatat memiliki tingkat pengangguran tertinggi.
- 2) Ketidakcocokan Keahlian (*Mismatch*): terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja/lulusan baru dengan kebutuhan lapangan kerja.
- 3) Minimnya Lapangan Kerja: terbatasnya sektor industri dan lapangan usaha yang tersedia untuk menyerap angkatan kerja yang terus meningkat.
- 4) Kepadatan Penduduk: peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pekerjaan (kepadatan penduduk)

berpengaruh signifikan terhadap naiknya pengangguran.

- 5) Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi: pertumbuhan ekonomi yang lamban membatasi ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja baru.
- 6) Faktor Infrastruktur: terbatasnya infrastruktur dan kondisi geografis di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur menghambat pertumbuhan ekonomi.

Solusi kebijakan yang terstruktur dan operasional untuk menjawab permasalahan tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur:

- 1) Program Padat Karya Produktif Terintegrasi
 - Perluasan padat karya berbasis desa (irigasi, embung, jalan produksi).
 - Dikaitkan dengan pelatihan keterampilan sederhana.
 - Menyasar penganggur usia muda dan setengah penganggur.
- 2) *Job Matching* dan Bursa Kerja Digital Terpadu
 - Integrasi data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, SMK, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.
 - Pemetaan kebutuhan industri lokal.
 - *Job fair* rutin berbasis sektor prioritas.
- 3) Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar (*Demand-Driven Training*)
Pelatihan difokuskan pada:
 - Agroindustri
 - Pariwisata
 - Perikanan
 - Konstruksi
 - Skema pelatihan + sertifikasi + magang.
- 4) Revitalisasi SMK dan Pendidikan Vokasi
 - *Link and match* dengan industri.
 - Kurikulum berbasis kompetensi daerah.
 - *Teaching factory* di SMK.
- 5) Pengembangan Sektor Padat Karya Unggulan
Fokus pada sektor dengan daya serap tinggi

- Hilirisasi pertanian dan peternakan.
- Industri pengolahan hasil laut.
- UMKM berbasis local.
- Ekowisata dan pariwisata desa.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis **“Terciptanya Lapangan Kerja Dan Meningkatnya Kesempatan Kerja”** sebesar 68,08 % dengan kategori **Cukup Berhasil**.

Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Sasaran strategis ini mencakup dua (2) indikator sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
				Target	Realisasi (ribu rupiah)	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Pengeluaran per kapita	Rupiah	8,534	7,762	8,735	112,5	7,954	109,8
2	Inflasi	%	1,19	3,5±1	2,39	68,28- 159,23	35,1±1	104,40- 146,85
Rata-rata Capaian						90,39- 135,86		

Sumber data: BPS Provinsi NTT, Desember 2025

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran per kapita

Pengeluaran per kapita adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita merupakan instrumen yang digunakan untuk memotret kemampuan rata-rata individu-individu dalam setiap rumah dalam aspek konsumsi.

a. Pengeluaran per kapita

Realisasi pengeluaran per kapita pada tahun 2025 adalah sebesar Rp8,735 juta per tahun, artinya setiap satu orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya mampu untuk melakukan pembelian

sebesar Rp8,735 juta setiap tahunnya atau jika dirubah menjadi per bulan maka tiap orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kemampuan untuk berbelanja sebesar kurang lebih Rp975.854, dengan pengeluaran terendah adalah di Kabupaten Sabu Raijua yakni sebesar Rp6,452 juta tiap tahunnya. Sedangkan pengeluaran tertinggi adalah sebesar Rp14,262 juta yakni di Kota Kupang. Capaian pengeluaran per kapita pada tahun 2025 adalah sebesar 112.32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.762 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar Rp264.854. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 sebesar Rp7,954 juta, maka pengeluaran per kapita telah mencapai 109,8%.

Realisasi Pengeluaran per kapita nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp12,8 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran per kapita nasional, Pengeluaran per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 masih lebih rendah sebesar Rp4,26 juta.

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Pengeluaran per kapita di Provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kepadatan penduduk dan Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran riil per kapita disesuaikan menurut kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)		
	2023	2024	2025
Sumba Barat	7,993	8,243	8,530
Sumba Timur	10,008	10,280	10,619
Kupang	8,220	8,508	8,745
Timor Tengah Selatan	7,450	7,755	7,951
Timor Tengah Utara	6,889	7,242	7,364
Belu	7,907	8,159	8,354
Alor	7,565	7,806	8,022
Lembata	7,962	8,238	8,397
Flores Timur	8,223	8,505	8,700

Wilayah	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)		
	2023	2024	2025
Sikka	8,678	9,019	9,219
Ende	9,739	10,009	10,126
Ngada	9,350	9,585	9,827
Manggarai	7,903	8,204	8,423
Rote Ndao	7,061	7,365	7,652
Manggarai Barat	7,913	8,195	8,351
Sumba Tengah	6,484	6,743	6,965
Sumba Barat Daya	7,080	7,358	7,588
Nagekeo	8,706	8,986	9,213
Manggarai Timur	6,276	6,561	6,745
Sabu Raijua	5,899	6,207	6,452
Malaka	6,569	6,879	7,067
Kota Kupang	13,762	14,001	14,262
Nusa Tenggara Timur	8,248	8,534	8,735

Sumber data: BPS Provinsi NTT, November 2025

2. Inflasi

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga baarang dan jasa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan nilai uang yang dimiliki masyarakat menurun sehingnga dengan jumlah uang yang sama masyarakat membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit.

a. Capaian target inflasi

Stabilitas target inflasi nasional berada pada rentang $2,5\% \pm 1\%$. Target inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebesar $3,5\% \pm 1\%$ dengan realisasi sebesar 2,39%. Jika dibandingkan target pesimis sebesar 3,5% maka capaian indikator laju inflasi tahun 2025 adalah sebesar 68,28%. 159,33%, sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 1%, maka capaian indikator inflasi pada tahun 2025 adalah sebesar 159,33%, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 1,19, maka capaian ini masih berada dalam rentang stabil. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 maka capaian terhadap target pesimis sebesar 159,33% dan capaian terhadap target optimis sebesar 68,28%.

Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di bawah angka inflasi nasional pada urutan ke 6 provinsi terendah, dimana angka inflasi nasional baik inflasi tahunan (y-on-y) maupun inflasi kalender (y-to-d) yaitu 2,92%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Inflasi y-on-y Desember 2025 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 2 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,42 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,62 persen; sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks kelompok makanan, minuman, tembakau sebesar 1,74 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,37 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,05 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1.62 sedangkan kelompok yang tidak mengalami kenaikan dan penurunan yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 0,01 persen pada Desember 2025.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada tahun 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan secara (y-on-y) dan kenaikan indeks harga (m-to-m), sehingga terjadi inflasi (y-on-y) sebesar 2,39%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,40 pada tahun 2024 menjadi 108,94 pada tahun 2025. Secara (m-to-m) terjadi inflasi sebesar 0,81 % dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,39 % pada tahun 2025, kondisi ini dapat dikatakan baik karena masih berada dalam rentang sasaran inflasi ($2,5\% \pm 1\%$). Adapun upaya konkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani inflasi daerah yaitu :

- 1) Melaksanakan operasi pasar murah;
- 2) Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;

- 3) Kerja Sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- 4) Gerakan Menaman;
- 5) Merealisasikan Bantuan Langsung Tunai;
- 6) Dukungan Transportasi dari APBD.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ” **Meningkatkan Daya Beli Masyarakat**” sebesar 90,39% (target optimis) dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 6 : Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Sasaran ini mencakup satu (1) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.9
Target dan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	19,02	19,35-18,85	17,50	96,12-96,67	18,50-17,03	94,59-102,75
Capaian					96,12-96,67		

Sumber data: BPS Provinsi NTT, Desember 2025

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 1.930 kilo kalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Semakin sedikit persentase penduduk yang masuk dalam golongan penduduk miskin berarti semakin

banyak penduduk yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di atas garis kemiskinan dibandingkan dengan kelompok yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan, dan sebaliknya.

a. Capaian target Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur adalah 1,03 juta jiwa. Target persentase penduduk di bawah garis kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 19,35-18,85 dengan realisasi pada Oktober 2025 adalah sebesar 17,50%. Jika dibandingkan dengan target pesimis tahun 2025 sebesar 19,35%, capaian persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 96.12%, dibandingkan dengan target optimis tahun 2025 sebesar 18,85%, maka capaian persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 96,67%.

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 19,02% maka kinerja penanggulangan kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1,52%. Jika dibandingkan dengan target pesimis pada akhir RPD sebesar 18,50%, maka capaian persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 94,59%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis pada tahun akhir RPD sebesar 17,03%, dengan capaian persentase penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 102,75%.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,36 juta orang, dengan persentase 8,25% sehingga bila dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan nasional, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi 9,25%. Persentase penduduk miskin menurut provinsi dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3.3
Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi



Sumber data : BPS Provinsi NTT, September 2025

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan hasil capaian indikator persentase penduduk dibawah garis kemiskinan telah mencapai target, namun masih terdapat daerah miskin yang pada umumnya selain memiliki akses pada sumber daya ekonomi rendah, juga merupakan daerah dengan tingkat pendidikan rendah, akses terhadap air bersih sulit, dan akses terhadap fasilitas kesehatan rendah. Masalah-masalah kesehatan seperti gizi buruk pada anak-anak juga lebih banyak terdapat di daerah miskin. Kenaikan harga barang mengakibatkan banyak sektor mengalami kontraksi. Kontraksi yang terjadi berkorelasi lurus dengan pendapatan dan kesejahteraan. Pendapatan yang relatif menurun, hasil produksi relatif tetap, jumlah penduduk bertambah dan turunnya daya beli masyarakat meskipun pengaruhnya kecil namun tetap berkontribusi terhadap jumlah penduduk miskin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1) Rendahnya Kualitas Pendidikan dan SDM

Tingkat pendidikan yang rendah membatasi kesempatan kerja dan produktivitas.

- 2) Pertanian Konvensional dan Rendahnya Produktivitas
Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian tradisional yang rentan terhadap cuaca, mengakibatkan produktivitas rendah.
- 3) Keterbatasan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur yang belum merata menghambat akses ekonomi dan konektivitas antardaerah.
- 4) Pengangguran dan Pendapatan Rendah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berbanding lurus dengan tingginya kemiskinan.
- 5) Budaya dan Pesta Adat
Budaya konsumtif dalam upacara adat seringkali menyebabkan petani menggunakan modal/tabungan untuk kegiatan non-produktif.
- 6) Akses Finansial Terbatas
Kurangnya akses permodalan atau kredit usaha bagi masyarakat kecil.
- 7) Kerentanan Ekonomi dan Faktor Alam
Nusa Tenggara Timur sering terdampak bencana alam dan krisis ekonomi, serta Pandemi COVID-19 yang lalu, memperburuk kondisi Penanggulangan dan penanganan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif dan komprehensif, oleh semua *stakeholders*, pada setiap level pemerintahan.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis **"Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat"** sebesar 96.67% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran **Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antara**

Strategis 7 : **Kelompok Masyarakat**

Sasaran ini mencakup 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.10
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Indeks Gini	%	0,316	0,332-0,330	0,322	103,01%-102,42%	0,332-0,330	103,01%-102,42%
Capaian					103,01%-102,42%		

Sumber data: BPS Provinsi NTT, Desember 2025

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Gini

a. Capaian target pencapaian Indeks Gini

Indeks Gini merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan secara menyeluruh dalam suatu wilayah atau kelompok penduduk. Target Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah 0,332-0,330 dengan realisasi 0,322 poin sehingga memperoleh capaian 103,01%-102,42%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0,316 poin, maka terjadi kenaikan ketimpangan sebesar 0,007 poin.

Indeks Gini di Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami peningkatan ketimpangan pada tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 0,332-0,330, maka capaian Indeks Gini adalah sebesar 103,01%-102,42%. Sebagai perbandingan Gini Nasional pada September 2025 berada di angka 0.363, sehingga ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0.322 secara statistik lebih rendah dari rata-rata nasional.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

1) Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata

Meskipun ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh positif (mencapai 5,44% pada triwulan II-2025), pertumbuhan ini seringkali terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu seperti jasa dan

pariwisata. Hal ini dapat memperlebar jurang pendapatan antara pekerja di sektor modern perkotaan dengan petani di pedesaan.

2) Tingkat Pendidikan

Pendidikan tetap menjadi variabel paling dominan dalam mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Perbedaan akses terhadap pendidikan berkualitas mengakibatkan variasi kemampuan daya saing tenaga kerja, yang pada akhirnya memengaruhi distribusi pendapatan antar rumah tangga.

3) Kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan

Ketimpangan di NTT dipengaruhi oleh perbedaan signifikan dalam fasilitas infrastruktur dan akses pasar. Data menunjukkan pola pengeluaran yang berbeda; pada September 2025, Gini Ratio di pedesaan tercatat sebesar 0,309, sementara fluktuasi di perkotaan cenderung dipengaruhi oleh inflasi kebutuhan pokok.

4) Inflasi dan daya beli

Inflasi tahunan (y-on-y) di Nusa Tenggara Timur pada Desember 2025 mencapai 2,39%. Kenaikan harga barang pokok lebih membebani kelompok penduduk kelas bawah dibandingkan kelas atas, sehingga dapat memperburuk angka ketimpangan pengeluaran jika tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan yang setara.

5) Efektifitas belanja pemerintah

Realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di Nusa Tenggara Timur sempat mengalami kontraksi sebesar -11,37% pada pertengahan 2025. Penurunan atau keterlambatan penyaluran bantuan sosial serta program pemberdayaan ekonomi dapat menghambat upaya pemerataan pendapatan di lapisan masyarakat terbawah.

6) Kondisi ketenagakerjaan

Meskipun angka pengangguran cenderung rendah (sekitar 3,14%), tantangan utamanya adalah kualitas pekerjaan. Banyak pekerja di Nusa Tenggara Timur masih berada di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu, yang menjaga indeks ketimpangan tetap dinamis.

Solusi untuk mengatasi disparitas wilayah yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat yakni:

- 1) Menyusun strategi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur;
- 2) Pengembangan pelayanan kesehatan dan Pendidikan;
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
- 4) Pemerataan pembangunan infrastruktur;
- 5) Meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 6) Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dengan melakukan pemusatan ekonomi di wilayah-wilayah yang mengalami ketimpangan.

Sesuai penjelasan diatas, rata-rata capaian sasaran strategis “**Berkurangnya ketimpangan antar kelompok Masyarakat dan antar wilayah**” sebesar **103,01%-102,42%** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Sasaran ini mencakup 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.11
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Ratio PAD terhadap pendapatan daerah	%	30,21	26,85	25,79	96,05%	26,85	96,05%
Capaian					96,05%		

Sumber data: LKIP Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Tahun 2025, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 (data belum selesai audit)

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah

a. Capaian Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah

Target Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah tahun 2025 sebesar 26,85%, realisasi sebesar 25,79% dengan capaian sebesar 96,05%. Jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2024 sebesar 30,21%, maka terjadi penurunan Rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 4,42%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 capaiannya sebesar 96.05%.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah, karena belum mampu membiayai sebagian besar belanjanya dari PAD dan Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

Target dan Pendapatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Target dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.774.057.276.424,00	1.312.444.966.430,27
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	1.415.663.073.470,00	1.037.098.806.335,17
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	204.165.588.278,00	178.935.414.940,65
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	62.250.000.000,00	46.212.172.247,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	91.978.614.676,00	50.198.572.907,45
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.112.075.839.000,00	2.991.648.755.619,00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.112.075.839.000,00	2.991.648.755.619,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.011.347.868,00	202.593.045.983,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	1.581.698.115,00
4.3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00

Sumber data: LKIP Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Tahun 2025, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 (data belum selesai audit)

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

1) Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan tingkat kemiskinan



yang masih diatas rata-rata nasional membatasi daya beli serta kemampuan wajib pajak.

- 2) Tantangan geografis dan infrastruktur mempengaruhi arus ekonomi dan potensi pendapatan dari sektor perdagangan.
- 3) Realisasi retribusi daerah jauh dibawah target karena kendala dalam optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
- 4) Belum tersedianya Produk Hukum bagi obyek retribusi baru.

Dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan target pendapatan asli daerah diperlukan solusi sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan pajak;
- 2) Melakukan pengembangan potensi retribusi;
- 3) Melakukan Tax Amnesty;
- 4) Optimalisasi penerimaan sumber-sumber objek pendapatan baru;
- 5) Pengembangan potensi pariwisata.

Sesuai penjelasan diatas, rata-rata capaian sasaran strategis **“Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah”** sebesar 96.05% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 9 : Terjaminnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak, Disabilitas Dan Inklusi Sosial.

Sasaran ini mencakup 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.13

Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks Pembangunan gender	%	93,77	94	93,77*)	99,76	94,56	99,16
Capaian						99,76		

Sumber data: BPS tahun 2024*), diolah (data IPG Tahun 2025 belum dirilis)

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender menunjukkan tingkat kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

a. Capaian Target Indeks Pembangunan Gender

Target Indeks Pembangunan Gender Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebesar 94%, realisasi sebesar 93,77%*) dengan capaian sebesar 99,76%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 94,56%, maka capaian sebesar 99,16%. Capaian indeks pembangunan gender jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender Nasional Tahun 2024 sebesar 91,85 poin, capaian Indeks Pembangunan Gender Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di atas rata-rata nasional yang menunjukkan bahwa perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif lebih kecil dibanding rata-rata nasional.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator indeks pembangunan gender antara lain:

1) Akses dan Kualitas Pendidikan

Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh keterbatasan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, terutama akibat kondisi geografis kepulauan, jarak tempuh sekolah yang jauh, serta faktor sosial ekonomi dan praktik perkawinan usia anak. Pemerataan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja juga belum optimal, sehingga capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki dan berdampak pada capaian IPG Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Standar hidup layak

Pada dimensi standar hidup layak, dominasi perempuan pada

sektor informal dan pertanian subsisten dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah, keterbatasan akses terhadap permodalan dan pelatihan keterampilan, serta masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten/kota menyebabkan kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki masih cukup besar.

3) Norma sosial dan budaya

Selain faktor sektoral tersebut, pencapaian IPG juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, antara lain masih kuatnya norma patriarki dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan pembagian peran domestik yang tidak seimbang, yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan kegiatan ekonomi. Faktor geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bercirikan kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur transportasi dan layanan dasar turut mempengaruhi akses perempuan terhadap pelayanan publik.

4) Tata kelola pemerintahan

Dari sisi tata kelola pemerintahan, efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), keterbatasan anggaran responsif gender, serta ketersediaan dan kualitas data terpilah menurut jenis kelamin mempengaruhi ketepatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan berperspektif gender, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja IPG Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian sasaran strategis **“Terjaminnya Kesenjangan Gender Dan Perlindungan Anak, Disabilitas Dan Inklusi Sosial”** sebesar 99,76% dengan Kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 10 : Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Sasaran ini mencakup satu (1) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.14
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Skor Pola Pangan Harapan	Poin	72,38	76,50	79,34	103,71	77,00	103,04
Capaian					103,71		

Sumber data: LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

a. Capaian Target Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Target skor pola pangan harapan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebesar 76,50 poin dengan realisasi sebesar 79,34 poin dan capaian kinerja sebesar 103,71%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 77,00 poin, maka capaian terhadap target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 103,04%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 72,38 poin, maka terjadi peningkatan sebesar 6,96 poin. Peningkatan ini menunjukkan skor pola pangan harapan dengan tingkat keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Kondisi konsumsi pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditinjau dari sisi kuantitas yaitu hasil analisa PPH tahun 2025 berdasarkan angka SUSENAS dari BPS NTT, konsumsi energi Nusa Tenggara Timur rata-rata 1.930,43 kkal/kap/hari atau 91,92% terhadap angka kecukupan energi 2.100 kkal/kap/hari dan konsumsi protein 55,06 gr/kap/hari atau 96,59% terhadap angka kecukupan protein 57 gr/kap/hari.

Skor pola pangan harapan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 sebesar 79,34 poin jika dibandingkan dengan skor PPH Nasional tahun 2025 sebesar 95,1 poin, maka skor PPH Provinsi Nusa Tenggara Timur masih lebih rendah 15,76 dibandingkan dengan skor PPH Nasional. Hal ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat Indonesia yang relative beragam dan mendekati pola ideal dan sebaliknya skor PPH Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa di Nusa Tenggara Timur konsumsi pangan masyarakat belum mencapai level keragaman dan keseimbangan yang kuat. Artinya, pola konsumsi masih banyak didominasi oleh satu atau beberapa jenis pangan, belum sesuai dengan prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kualitatif dan kuantitatif, melalui perhitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Kenaikan poin skor PPH Provinsi Nusa Tenggara Timur mengindikasikan adanya perbaikan pada pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam dan mendekati komposisi ideal. Capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1) Ketersediaan dan akses pangan

Dari sisi ketersediaan dan akses pangan, produksi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan belum merata di seluruh wilayah, sehingga berdampak pada keterbatasan pasokan dan fluktuasi harga pangan bergizi dan ketergantungan pada satu jenis pangan (misalnya beras) menurunkan skor PPH karena kurang beragam.

2) Daya beli dan kondisi ekonomi rumah tangga

Faktor daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi pencapaian skor PPH, di mana rumah tangga berpendapatan rendah cenderung memilih pangan pokok yang mengenyangkan dengan harga terjangkau dibandingkan pangan sumber protein dan mikronutrien yang relatif lebih mahal.

3) Pengetahuan dan Perilaku Konsumsi Masyarakat

Preferensi terhadap pola makan tradisional yang tinggi karbohidrat serta rendahnya kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) menyebabkan perubahan pola konsumsi berlangsung secara gradual.

4) Diversifikasi Pangan Lokal

Pemanfaatan pangan lokal non-beras sebagai sumber karbohidrat alternatif dan protein nabati belum sepenuhnya berkembang, baik dari aspek produksi maupun pengolahan dan inovasi olahan agar diterima Masyarakat.

5) Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Skor PPH juga dipengaruhi oleh Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, ternak, dan perikanan, dampak iklim serta ketersediaan lahan dan sarana produksi.

6) Intervensi dan Program Pemerintah

Upaya pemerintah daerah melalui program diversifikasi dan edukasi konsumsi pangan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan skor PPH, antara lain melalui pengembangan pekarangan pangan, kampanye konsumsi pangan B2SA, serta dukungan terhadap produksi pangan lokal.

7) Infrastruktur dan Akses Wilayah

Faktor ini menekankan pada Kondisi jalan dan transportasi (terutama wilayah terpencil), ketersediaan pasar dan fasilitas penyimpanan pangan serta wilayah yang sulit akses.

8) Faktor Sosial dan Budaya

Skor PPH akan sulit apabila dalam masyarakat tersebut misalnya

pantangan makanan tertentu, pola konsumsi berdasarkan status sosial atau tradisi dan juga pembagian makanan dalam rumah tangga (anak dan ibu sering kurang prioritas).

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis **“Terwujudnya Ketahanan Dan Kedaulatan Pangan”** sebesar 103,71% atau dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Analisis dukungan Program dan Anggaran dalam Pencapaian Misi

Keberhasilan Tujuan satu : **“Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera Dan Berkeadilan Sosial”** didukung oleh 19 (sembilan belas) belas program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35,354,634,396,- dengan realisasi sebesar Rp. 28,931,983,368,- atau 81,83%.

Tabel 3.15
Rincian Program, Anggaran dan Realisasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI I				
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.947.574.620	1.519.430.410	78,02
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.184.905.504	7.744.923.155	94,62
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.452.376.350	1.028.334.710	70,80
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	53.889.670	51.263.000	95,13
5	Penyuluhan Pertanian	9.258.808.000	8.946.357.715	96,53
6	Penanganan Kerawanan Pangan	82.278.000	78.116.760	94,94
7	Pengawasan Keamanan Pangan	2.000.000	1.625.300	81,27
8	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	442.752.560	60.412.174	13,64
9	Pemasaran Pariwisata	6.554.034.360	4.314.828.871	65,83
10	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	194.709.600	15.200.000	7,81
11	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.950.000.000	3.306.100.159	83,70
12	Perlindungan Perempuan	841.572.610	521.419.242	61,96
13	Perlindungan Khusus Anak	884.195.954	448.043.339	50,60
14	Peningkatan Kualitas Keluarga	200.045.300	100.945.755	50,46
15	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	215.026.700	179.086.700	83,29
16	Pemenuhan Hak Anak	702.625.420	349.300.680	49,71
17	Pengendalian Penduduk	37.078.900	14.611.250	39,41
18	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	318.276.948	231.263.998	72,66
19	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	69.562.800	35.331.400	50,79
TOTAL ANGGARAN		35.354.634.396	28.931.983.368	81,83

Sumber Data: LKIP Perangkat daerah Provinsi NTT Tahun 2025



3.1.2. TUJUAN 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

Tujuan ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Tujuan II diukur dengan capaian pada 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya akses dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nusa Tenggara Timur yang berdaya saing dan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM Nusa Tenggara Timur yang Berdaya Saing

Sasaran ini mencakup 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	%	69,14	66,65-67	69,89	101,81-104,31	67,02-67,25	104,28-103,93
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,02	7,93	8,22	103,66	8,2	100,24
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	14,6	13,34	91,37	15	88,93
Rata-rata Capaian Sasaran						98,94-99,78		

Sumber Data: BPS NTT 2025 diolah

Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Capaian Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan di semua dimensi pembentukannya yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 mencapai angka 69,89

atau tumbuh 1,08 persen (0,75 poin) dibandingkan tahun 2024 (69,14). Jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 67% maka capaiannya sebesar 104,31%, sedangkan jika dibandingkan dengan target pesimis sebesar 66,65% maka capaiannya sebesar 101,81%. Apabila dibandingkan dengan target akhir optimis RPD sebesar 67,25% maka capaiannya sebesar 103,93%. Jika dibandingkan dengan target akhir pesimis RPD sebesar 67,02% maka capaiannya sebesar 104,28%.

Secara internal, terdapat ketimpangan capaian antar wilayah di Nusa Tenggara Timur. Sebagai pusat pemerintahan, Kota Kupang memimpin dengan proyeksi IPM mencapai 81,01 yang masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Sebaliknya, kabupaten lain seperti Malaka masih berada di angka 62,73 (data tahun 2024). Hal ini menunjukkan tantangan pembangunan yang masih besar di daerah pelosok.

Meskipun terus meningkat, IPM Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan masih berada di bawah rata-rata nasional yang pada tahun 2025 telah mencapai 75,90 dan menempati peringkat 35 dari 38 provinsi. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan literasi-numerasi.

Secara internasional, nilai IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur (0,698 dalam skala 0-1) menempatkan provinsi ini dalam kategori Pembangunan Manusia Sedang (*Medium Human Development*). Meskipun laporan lengkap UNDP 2025 baru dirilis bertahap, sebagai gambaran rata-rata global terakhir berada di kisaran 0,739 (Kategori Tinggi). Hal ini menunjukkan Nusa Tenggara Timur masih memiliki selisih sekitar 4 poin untuk mencapai rata-rata kualitas hidup penduduk dunia secara umum. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur setara dengan negara-negara seperti India (peringkat 130 dunia) atau Maroko, yang berada dalam transisi menuju pembangunan manusia tinggi.

Tabel 3.17
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2025

Wilayah	Tahun	
	2024	2025
Sumba Barat	67,70	68,46
Sumba Timur	70,28	70,99
Kupang	68,26	69,03
Timor Tengah Selatan	66,22	66,88
Timor Tengah Utara	67,27	67,87
Belu	68,13	68,89
Alor	67,70	68,44
Lembata	68,95	69,7
Flores Timur	69,79	70,61
Sikka	69,96	70,65
Ende	72,24	72,73
Ngada	72,04	72,53
Manggarai	69,35	70,1
Rote Ndao	66,40	67,91
Manggarai Barat	68,68	69,2
Sumba Tengah	64,46	65,29
Sumba Barat Daya	64,27	64,82
Nagekeo	69,70	70,48
Manggarai Timur	66,03	66,63
Sabu Raijua	62,06	62,74
Malaka	65,13	65,84
Kota Kupang	83,21	83,65
Nusa Tenggara Timur	69,14	69,89

Sumber data: BPS NTT 2025

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Capaian IPM didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Dimensi Kesehatan: Bayi yang lahir di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 memiliki Umur Harapan Hidup (UHH) hingga 72,16 tahun. Angka ini meningkat 0,33 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah tersebut.

b) Dimensi Pendidikan:

- Harapan Lama Sekolah (HLS): Anak-anak usia 7 tahun di Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat mengenyam pendidikan selama 13,34 tahun (setara Diploma I atau semester awal perkuliahan), meningkat dari 13,23 tahun pada 2024.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,22 tahun (setara kelas 2 SMP), naik 0,20 tahun dari tahun sebelumnya.

c) Dimensi Ekonomi:

- Dimensi Standar Hidup Layak: Pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) masyarakat Nusa Tenggara Timur mencapai peningkatan sebesar Rp 201 ribu atau tumbuh 2,36 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini merupakan salah satu motor penggerak utama kenaikan IPM Nusa Tenggara Timur di tahun 2025.

Beberapa catatan penting capaian IPM Nusa Tenggara Timur 2025:

- Peningkatan merata: Seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan IPM pada tahun 2025.
- Status capaian: Kota Kupang menjadi satu-satunya wilayah dengan kategori "sangat tinggi" (80), yaitu 83,65.
- Peningkatan status: Kabupaten Sikka, Flores Timur, Nagekeo, dan Manggarai berhasil naik status dari "sedang" menjadi "tinggi".
- Peringkat bawah: meskipun membaik, Nusa Tenggara Timur masih menempati urutan ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia (data tahun 2024, narasi tahun 2025 masih menempatkan di posisi rendah).

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

a. Capaian Target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) adalah jumlah tahun yang sudah ditempuh oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas. RLS penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi

Nusa Tenggara Timur tahun 2025 sebesar 8,22 tahun, atau mengalami kenaikan 0,20 dari tahun 2024 yang mencapai 8,02 tahun. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 7,93 tahun maka terdapat gap sebesar 0.29 tahun sehingga capaiannya sebesar 103,66%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yaitu 8,2 tahun maka capaiannya sebesar 100,24%.

Pada tahun 2025, rata-rata lama sekolah nasional Indonesia dilaporkan mencapai 9,07 tahun (hampir menamatkan SMA kelas 10). Dengan RLS di kisaran 8,22 tahun, Nusa Tenggara Timur masih tertinggal cukup jauh dari rata-rata nasional karena masih terdapat gap sebesar 0,85 tahun. Meskipun laporan spesifik PBB 2025 mengenai RLS tingkat provinsi belum dirilis, rata-rata global rata-rata lama sekolah sering kali berada di angka 8,7 tahun (2026, menurut *World Economics*). Artinya, RLS Nusa Tenggara Timur pada 2025 masih berada di bawah rerata dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa modal manusia (*human capital*) di Nusa Tenggara Timur, jika diukur dengan lamanya pendidikan formal, masih membutuhkan intervensi kebijakan yang signifikan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Capaian ini merupakan kontribusi RLS semua kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk NTT
15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025

15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025				
No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2024	2025	
Kabupaten				
1	Sumba Barat	7,17	7,39	0,22
2	Sumba Timur	7.77	7,94	0,17
3	Kupang	7.62	7,87	0,25
4	Timor Tengah Selatan	7,21	7,43	0,22
5	Timor Tengah Utara	8.17	8,36	0,19
6	Belu	7.50	7,73	0,23
7	Alor	8.61	8,72	0,11
8	Lembata	8.27	8,49	0,22

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2024	2025	
9	Flores Timur	8.06	8,19	0,13
10	Sikka	6.99	7,2	0,21
11	Ende	8.29	8,52	0,23
12	Ngada	8.83	8,84	0,01
13	Manggarai	7.91	8,17	0,26
14	Rote Ndao	7.83	7,84	0,01
15	Manggarai Barat	8,21	8,26	0,05
16	Sumba Tengah	7.23	7,5	0.27
17	Sumba Barat Daya	6.39	6,47	0,08
18	Nagekeo	8.23	8,47	0,24
19	Manggarai Timur	7.96	8,11	0,15
20	Sabu Raijua	6.99	7,1	0,11
21	Malaka	7.14	7,38	0,24
Kota				
1	Kota Kupang	11,64	11,66	0,02
Nusa Tenggara Timur		8,02	8,22	0,2

Sumber Data: BPS NTT, 2025

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Rendahnya RLS di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 berbanding lurus dengan tantangan struktural yang membelit, yaitu:

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
- Tingkat kemiskinan yang tinggi (17,5% pada Sep 2025).
- Kebutuhan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 untuk meningkatkan RLS di Nusa Tenggara Timur adalah fokus pada peningkatan layanan pendidikan melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan program-program yang menargetkan penurunan angka putus sekolah untuk mendongkrak RLS. Peningkatan RLS menjadi bagian dari upaya menciptakan SDM yang lebih cerdas dan berdaya saing untuk keluar dari jerat kemiskinan dan keteringgalan sebagaimana yang telah dimuat dalam dokumen RPJPD NTT 2025-2045.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah NTT tahun 2025 menunjukkan bahwa penduduk NTT umumnya baru menamatkan pendidikan dasar menengah (SMP), yang masih di bawah rata-rata nasional (SMA awal) dan di bawah rata-rata global. NTT masih harus berjuang keras untuk meningkatkan angka lama sekolah guna keluar dari posisi 10 besar provinsi dengan tantangan pendidikan tertinggi di Indonesia.

3. Harapan Lama Sekolah (HLS)

a. Capaian target Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dicapai oleh anak pada usia tertentu di masa depan. HLS dihitung untuk anak usia 7 tahun ke atas. Angka HLS dan RLS: merupakan dua komponen utama penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mewakili dimensi pendidikan. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA di Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Secara langsung, ketika tingkat kelulusan SD, SMP dan SMA meningkatkan maka angka HLS dan RLS yang merupakan dua indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat.

HLS Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 sebesar 13,34 tahun, naik 0,12 dibanding realisasi tahun 2024 yaitu 13,22 sehingga capaiannya sebesar 91,37%. Realisasi tahun 2025 belum mencapai target RLS Nasional sebesar 15 tahun. Pada akhir RPD diharapkan angka HLS dapat mencapai 15 tahun sehingga perlu upaya mengejar ketertinggalan gap sebesar 1,60 tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD maka capaiannya sebesar 88,93%. Meskipun HLS Nusa Tenggara Timur terus meningkat, angka HLS (rata-rata tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani anak usia 7 tahun ke atas) umumnya masih di bawah 13 tahun, atau di bawah rata-rata nasional. Data BPS pada akhir 2025 menunjukkan Nusa Tenggara Timur masih masuk dalam daftar 10 provinsi dengan tingkat anak tidak sekolah tertinggi, mencapai 0,98% (data anak 7-12 tahun tidak sekolah).

HLS Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kontribusi HLS kabupaten/kota yang dapat digambarkan tahun 2024 dan 2025 pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Harapan Lama Sekolah Penduduk NTT
15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2024	2025	
Kabupaten				
1	Sumba Barat	13.40	13,41	0,01
2	Sumba Timur	12.87	12,88	0,01
3	Kupang	13.90	13,91	0,01
4	Timor Tengah Selatan	12.62	12,63	0,01
5	Timor Tengah Utara	13.36	13,39	0,03
6	Belu	12.32	12,33	0,01
7	Alor	12.48	12,59	0,11
8	Lembata	12.47	12,54	0,07
9	Flores Timur	12.96	13,17	0,21
10	Sikka	13.67	13,68	0,01
11	Ende	13.83	13,84	0,01
12	Ngada	12.75	12,76	0,01
13	Manggarai	13.73	13,74	0,01
14	Rote Ndao	13.23	13,24	0,01
15	Manggarai Barat	12.54	12,62	0,08
16	Sumba Tengah	13.14	13,15	0,01
17	Sumba Barat Daya	13.11	13,12	0,01
18	Nagekeo	12.69	12,74	0,05
19	Manggarai Timur	12.66	12,67	0,01
20	Sabu Raijua	13.19	13,20	0,01
21	Malaka	12.83	12,84	0,01
Kota				
1	Kota Kupang	16,54	16,55	0,01
Nusa Tenggara Timur		13,22	13,34	0,12

Sumber Data: BPS NTT, 2025

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Harapan Lama Sekolah (HLS) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: persentase penduduk miskin, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, rasio fasilitas pendidikan, serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Data ini menunjukkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun di

Nusa Tenggara Timur yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,23 tahun atau setara dengan Diploma I. Kontribusi terbesar tidak tercapainya target HLS tahun 2025 disumbang oleh angka HLS Kabupaten Belu, Alor dan Lembata. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan, peningkatan kualitas pengajar/guru, pemberian bantuan dana pendidikan, hingga menanamkan pentingnya pendidikan untuk investasi di masa depan kepada masyarakat.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis **“Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM Nusa Tenggara Timur yang Berdaya Saing”** sebesar **99,78%** (target optimis) atau dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Analisis Program dan Anggaran Perangkat Daerah yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja

Harapan lama sekolah di Nusa Tenggara Timur tahun 2025 masih tertinggal dibandingkan target nasional. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi tantangan besar, di mana angka anak tidak sekolah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, menempatkan Nusa Tenggara Timur di posisi 10 tertinggi dalam daftar anak tidak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.

Tabel 3.20
Program, anggaran dan realisasi

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
1.	Pengelolaan Pendidikan	680.100.969.544	641.015.250.222	94,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	114.735.300	75.348.300	65,67	
3.	Pengembangan Bahasa dan Sastra	445.529.400	350.045.400	78,57	
4.	Pengembangan Kesenian Tradisional	5.180.721.973	4.863.563.434	93,88	
5.	Pengembangan Kebudayaan	2.141.477.700	2.044.134.919	95,45	
6.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	633.399.200	615.760.900	97,21	

7.	Pengelolaan Permuseuman	3.408.211.600	3.302.393.440	96,90	
Jumlah		692.025.044.717	652.266.496.615	94,25	

Sumber: LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tahun 2025

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan diukur melalui dua (2) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.21
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,83	68	72,16	106,12	69	104,58
2.	Prevalensi Stunting	%	16,9	33,10	37,0	88,2	9	-211,11
Rata-rata Capaian Sasaran						97,16		

Sumber data: BPS NTT 2025

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Usia Harapan Hidup

a. Capaian target Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu komponen pembentuk IPM sekaligus sebagai indikator dampak peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan terus hidup atau rata-rata jumlah tahun yang dijalani seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun ke-X.

Usia Harapan Hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur tahun 2025 adalah 72,16 atau mengalami kenaikan sebesar 0,33 tahun dari realisasi tahun 2024 sebesar 71,83 tahun. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 68 tahun maka capaiannya sebesar 106,12%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yaitu 69 tahun capaiannya sebesar 104,58%. Jika dibandingkan dengan Usia

Harapan Hidup Tingkat Nasional sebesar 74,47 maka terjadi gap sebesar 2,64 tahun dengan capaiannya sebesar 96,45%.

Usia Harapan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kontribusi dari Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.22
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Umur Harapan Hidup Life Expectancy At Birth (Year)	
	2024	2025
Sumba Barat	71,37	71,63
Sumba Timur	71,57	71,91
Kupang	69,53	69,91
Timor Tengah Selatan	71,22	71,47
Timor Tengah Utara	71,02	71,39
Belu	74,30	74,77
Alor	70,88	71,33
Lembata	73,35	73,81
Flores Timur	73,91	74,37
Sikka	74,24	74,64
Ende	72,87	73,06
Ngada	74,43	74,89
Manggarai	72,44	72,76
Rote Ndao	69,81	70,17
Manggarai Barat	72,86	73,24
Sumba Tengah	69,46	69,77
Sumba Barat Daya	69,20	69,46
Nagekeo	72,51	72,89
Manggarai Timur	72,98	73,19
Sabu Raijua	66,65	66,88
Malaka	71,47	71,72
Kota/Municipality		
Kota Kupang	74,95	75,38
Nusa Tenggara Timur	71,57	72,16

Sumber Data: BPS NTT 2025, diolah

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup melalui program Pembangunan Kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan termasuk Kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta pemberantasan kemiskinan.

2. Prevalensi Stunting

a. Capaian Target Prevalensi Stunting

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat.

Menurut perhitungan e-PPGBM, presentasi stunting di Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 mencapai 20,50%, sehingga dapat dikatakan sudah turun jauh dibandingkan target. Namun secara kelembagaan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang diakui untuk melakukan evaluasi terhadap bayi balita stunting hanya melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2025 yang akan dirilis pada bulan Juni 2026.

Prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 masih menjadi perhatian utama nasional, dengan angka tertinggi di Indonesia yang mencapai 37% berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dipublikasikan pada Desember 2025. Adapun target penurunan stunting sebesar 33,10% sehingga capaiannya sebesar 88,21%. Semerntara itu target nasional penurunan prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **18,8 persen**. Target ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menurunkan angka stunting, dengan target jangka panjang mencapai 14,2 persen pada 2029. Jika dibandingkan target nasional sebesar 18,8% maka capaiannya sebesar 3,19%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 9% maka capaiannya sebesar -211,11%.

Prevalensi stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kontribusi dari kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.23
Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	2023		2024	
		Stunting	%	Stunting	%
1	Sumba Barat	1291	12	1787	23,6
2	Sumba Timur	2677	12	3365	15,1
3	Kupang	3872	13	3902	14
4	Timor Tengah Selatan	8924	22	9251	24,2
5	Timor Tengah Utara	4555	23	4802	25,9
6	Belu	1984	11	2351	13,9
7	Alor	1773	10	2260	13,1
8	Lembata	1045	12	673	7,9
9	Flores Timur	3184	18	3265	20
10	Sikka	3318	15	3375	19,3
11	Ende	1241	7	1796	10,5
12	Ngada	902	8	997	9,8
13	Manggarai	3481	13	2882	11,5
14	Rote Ndao	2764	20	2359	18,4
15	Manggarai Barat	1901	8	2608	11,8
16	Sumba Tengah	549	7	1036	15,3
17	Sumba Barat Daya	9762	32	6730	39,2
18	Nagekeo	728	7	928	9,6
19	Manggarai Timur	2195	9	1992	8,3
20	Sabu Raijua	1230	15	1626	20,8
21	Malaka	2409	16	2289	15,4
22	Kota Kupang	4019	17	4233	18,8
Provinsi NTT		63804	15	64507	16,9

Sumber Data: BPS NTT 2024 (Data 2025 belum dirilis oleh Kemenkes)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk menurunkan angka Prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Intervensi Gizi Spesifik (Balita & Bumil):

- Pemberian Makanan Tambahan (PMT): Pemberian susu kelor, sereal, dan nugget berbasis bahan lokal.
- Program Anak Asuh: Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang.
- Suplementasi: Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk ibu hamil.



- ASI Eksklusif & MPASI: Edukasi pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan MPASI kaya protein hewani.
2. Intervensi Gizi Sensitif (Lingkungan & Fasilitas):
- Sanitasi dan Air Bersih: Penerapan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBL), termasuk berhenti buang air besar sembarangan.
 - Peningkatan Posyandu: Penguatan peran tim pendamping keluarga di posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak.
 - Program Pekarangan: Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga.
3. Kolaborasi dan Edukasi Lintas Sektor:
- DOBRAK STUNTING: Inovasi Balai POM Kupang melibatkan Pemda, akademisi (Poltekkes), dan komunitas.
 - Peran Tokoh Masyarakat: Edukasi mengenai gizi dan pengasuhan anak oleh tokoh agama, adat, dan masyarakat.
 - Gerakan Ayah Teladan: Mendorong peran aktif ayah dalam pengasuhan anak.
 - Pemantauan Data: Evaluasi rutin prevalensi stunting di 22 kabupaten/kota.

Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 4 (empat) Program dengan dukungan anggaran sebesar: Rp162.060.327.546 (seratus enam puluh dua milyar enam puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp145.562.990.596 (Seratus empat puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) atau mencapai 89,82%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.24
Program, anggaran dan realisasi

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %	Perangkat Daerah
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	138.400.812.121	128.984.550.051	93,20	Dinas Kesehatan
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.584.855.425	16.533.352.045	70,10	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	34.660.000	24.052.500	69,40	
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	40.000.000,00	21.036.000,00	52,59	
	Jumlah	162.060.327.546	145.562.990.596	89,82	

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan 2025

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian sasaran **“Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan”** sebesar **89,82%** dengan kategori **Berhasil**.

Analisis dukungan Program dan Anggaran

Dalam Pencapaian Misi Keberhasilan Tujuan dua : **“ Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing”**, didukung oleh 2 sasaran strategis yaitu Meningkatkan Akses dan Kualitas SDM Nusa Tenggara Timur yang Berdaya Saing dengan capaian sebesar 99,78% dan Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan capaian sebesar 89,82% sehingga memperoleh rata-rata capaian sebesar 94,80%

3.1.3. Tujuan 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP, KEWILAYAHAN DAN MITIGASI BENCANA

Sasaran Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung

Strategis 1 : Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran ini, mencakup dua (2) indikator sebagai berikut:

Tabel 3.25

Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Presentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	67,98 (1.827,07 km)	86,86 (2.334,20 km)	69,73 (1.873,861 km)	80,28 (1.873,89 km)	86,86 (2.334,20 km)	80,28 (1.873,89 km) (terhadap 2.334,20 km)
2.	Ratio elektrifikasi	%	92,58	94	96,49	102,64	95	101,56
Rata-rata Capaian						91,46		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2025 dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT Tahun 2025

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

a. Capaian Target Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Pada tahun 2025 target persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap 86,86% (2.334,20 km), realisasi 69,73% (1.873,861 km) dengan capaian 80,28% (1.873,89 km) dari total panjang jalan provinsi sepanjang 2.687,31 km.

Untuk mendukung capaian target tersebut, Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya dengan melakukan penanganan terhadap ruas jalan yang tidak mantap di Tahun 2024 sepanjang 860,24 km sehingga panjang jalan yang tidak mantap di

tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 813,449 km, namun berdasarkan hasil survey kondisi jalan Tahun 2025 panjang jalan yang tidak mantap sepanjang 822,46 km. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 67,98% atau 1.827,07 km, maka terjadi peningkatan jalan mantap sepanjang 46,79 km. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 sebesar 86,86% atau 2.334,20 km, maka capaian panjang jalan provinsi kondisi mantap telah mencapai 1.873,89 km (80,28%).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap belum mencapai target, adapun kendala yang menyebabkan belum tercapainya target presentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap antara lain disebabkan oleh :

1. Ada paket-paket fisik yang pelaksanaan pekerjaannya mengalami keterlambatan sehingga menjadi paket luncuran di tahun 2026.
2. Adanya paket pekerjaan yang baru dianggarkan pada periode anggaran perubahan sehingga pelaksanaan lelang paket pekerjaan mengalami keterlambatan untuk proses pelaksanaannya.
3. Kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi progress pekerjaan di lapangan.
4. Terdapat ruas-ruas jalan provinsi pada umumnya berada pada daerah-daerah yang tingkat curah hujannya tinggi sehingga pelaksanaan tender harus di mulai pada awal tahun (bulan januari).

Solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala dalam pencapaian program:

1. Apabila adanya paket-paket yang penganggarannya dilakukan pada periode perubahan anggaran DPPA dapat diusulkan dalam pelaksanaan fisik sebaiknya menggunakan muti year sehingga tidak terjadi PHK atau luncuran.

2. Kedepan pelaksanaan tender dimulai lebih awal sehingga tidak berpengaruh terhadap pekerjaan fisik dilapangan dan tidak memasuki musin penghujan.

2. Rasio Elektrifikasi

a. Capaian Target Rasio Elektrifikasi

Target rasio elektrifikasi pada tahun 2025 yaitu 94%, realisasi 96,49% dengan capaian sebesar 102,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 92,58%, maka realisasi Rasio Elektrifikasi di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,91%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 sebesar 95%, maka capaian realisasi rasio elektrifikasi sudah melebihi target yaitu sebesar 101,56%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator rasio elektrifikasi meningkat dari target yang ditetapkan, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2025, yaitu :

1. Adanya kebijakan pemerintah dalam percepatan program elektrifikasi nasional, termasuk program listrik desa dan bantuan subsidi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi faktor utama dalam meningkatkan jumlah rumah tangga berlistrik;
2. Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, PT PLN (Persero), dan pihak swasta dalam perencanaan serta pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
3. Adanya Program Bantuan Pemasangan Listrik, Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Program Ketenagalistrikan.

Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 2 (dua) Program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	101.184.140.570,-	94.871.459.040,-	93,76
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan Kelistrikan	2.033.495.860,-	1.973.127.933,-	97,03

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2025 dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT Tahun 2025

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar” sebesar 91,46%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.184.140.570,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.871.459.040,- atau mencapai 93,76% dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.033.495.860,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.973.127.933,- atau mencapai 97,03%.

Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur **Sangat Berhasil** mencapai sasaran strategis pada target akhir RPD Tahun 2026.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah

Sasaran ini didukung 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.27

Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	75	73,95	78,60	106,28	74,28	105,81
Capaian						106,28		

Sumber data: LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2025

Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

a. Capaian Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2025 target indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 73,95 poin, realisasi sebesar 78,60 poin atau mencapai 106,28%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 75 poin, maka capaian indeks kualitas lingkungan hidup di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,6 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 sebesar 74,28 poin maka capaiannya sebesar 105,81%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan, adapun upaya yang dilakukan, adalah :

1. Kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dan sub kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan;
2. Penanganan lahan kritis di dalam kawasan hutan difokuskan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan hutan lestari, sementara penanganan di luar kawasan hutan memerlukan sinergi lintas sektor dan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat;
3. Pengolahan limbah B3;
4. Pemanfaatan dokumen lingkungan hidup dan pelayanan pengujian laboratorium.

Upaya ini secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut dan penutupan lahan yang berpengaruh langsung terhadap nilai indeks kualitas lingkungan hidup.

Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menetapkan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.28
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi) menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	540.004.619,-	463.531.549,-	85,83

Sumber Data: LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis



“meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup daerah” sebesar **106,28%**. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) program oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.004.619,- dan realisasi sebesar Rp. 463.531.549,- atau mencapai 85,83%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur **Sangat Berhasil** mencapai sasaran strategis pada target akhir RPD Tahun 2026.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Lingkungan

Sasaran ini mencakup 1 (satu) indikator sebagai berikut:

Tabel 3.29
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks resiko bencana	Poin	132	138	197,43	56,93	135	53,75
Capaian						56,93		

Sumber data: LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Risiko Bencana

a. Capaian Target Indeks Risiko Bencana

Pada tahun 2025 target indeks risiko bencana sebesar 138 poin, realisasi sebesar 197,43 poin dengan capaian sebesar 56.93%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 132 poin, maka capaian indeks risiko bencana di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 65,43 poin. Jika dibandingkan dengan Target Akhir RPD 2026 sebesar 135 poin maka capaiannya sebesar 53,75%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena berdasarkan pemantauan data hingga awal tahun 2026 mengenai situasi tahun 2025, memang terdapat indikasi peningkatan intensitas bencana dan risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah poin-poin penting terkait indeks resiko bencana di Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 (*sumber : lenting.fprbprovinsintt.com*):

- Intensitas Bencana Tinggi Awal 2025
Sepanjang Januari hingga Maret 2025, Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat serangkaian kejadian bencana alam dengan intensitas cukup tinggi.
- Jumlah Kejadian Bencana
Awal Tahun 2025, Nusa Tenggara Timur dihantam gelombang bencana dengan total 60 kejadian yang tercatat dalam kurun waktu singkat.
- Bencana Hidrometeorologi
Nusa Tenggara Timur termasuk dalam 10 (sepuluh) provinsi dengan tingkat kejadian bencana hidrometeorologi tertinggi (banjir bandang, suaca ekstrem, dan tanah longsor) dalam satu dekade terakhir, dan tren ini berlanjut di 2025.
- Pemutakhiran Indeks Resiko Bencana
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemutakhiran Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kajian teknokratik RPJMD untuk menghadapi peningkatan risiko ini.
- Cuaca Ekstrem
BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem di Nusa Tenggara Timur yang berpotensi berlangsung sepanjang tahun, termasuk prediksi puncak musim hujan pada Januari 2025.

Sebagai catatan, data indeks resiko bencana terus diperbarui oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNPB untuk mengukur Tingkat risiko, yang mencakup bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah.

Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut perangkat daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.30
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	6.038.452.911,-	5.705.028.293,-	86,64

Sumber Data: LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan” sebesar **56,93%**. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 1 program oleh 1 perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.038.452.911,- dan realisasi sebesar Rp. 5.705.028.293,- atau mencapai 86,64%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur **“Sangat Berhasil”** mencapai sasaran strategis pada target akhir RPD Tahun 2026.

3.1.4. TUJUAN 4 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, efektif, lincah dan kolaboratif. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi Nepotisme, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Keberhasilan pelaksanaan tujuan keempat Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 diukur dengan pencapaian target kinerja dari sasaran strategis Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Sasaran strategis tersebut mencakup 7 (tujuh) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis

Capaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.31
Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 RPD 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPD	Capaian Terhadap RPD
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,63	64-65	75,63*)	118,17	65,5-67	115,46%- 112,88%
2.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP*)	100	WTP	100%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	Predikat B 63,68	A (>80-90)	Predikat B 61,62	72,49	Predikat A (>80-90)	72,49%
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,89	2,5	3,89*)	155,6	2.7	144,07
5.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94,30 (Informatif)	90	93,30	103,66	95	98,21



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPD	Capaian Terhadap RPD
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86,16 (Baik)	90	87,12 (Baik)	96,80	90	96,80
7.	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	79,47	82,4	79,47*)	96,44	83	95,74
Rata-rata Capaian Sasaran						106,03		

Sumber data: Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, BPS NTT, Badan Keuangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika, diolah

*) data tahun 2024

Analisis terhadap capaian indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

a. Capaian Target Indeks Reformasi Birokrasi

Target Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 sebesar 64,00 – 65,00 poin dengan realisasi sebesar 75,63*) poin. Capaian terhadap target pesimis sebesar 118,17% dan terhadap target optimis sebesar 116,35%. capaian indeks reformasi birokrasi tersebut merupakan akumulasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 65,5-67 poin maka capaian pesimis Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 116,99% dan capaian optimis Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 88,58%.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024*) melampaui target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2024 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2026 sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.



- 2) Adanya komitmen pimpinan dalam menetapkan target capaian Reformasi Birokrasi yang jelas.
- 3) Implementasi rencana aksi dalam unit kerja, dan
- 4) Pemilihan program berdampak pada capaian sasaran Reformasi Birokrasi.

2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

a. Capaian Target Opini BPK

Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dirilis oleh BPK-RI Tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*). Hal ini sesuai dengan target Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni WTP. Jika dibandingkan dengan target WTP pada tahun terakhir RPD, maka capaian kinerja Opini BPK telah mencapai target.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025*) mencapai target WTP. Pemberian opini ini merupakan bentuk apresiasi terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal-hal yang mendasari Opini WTP oleh BPK-RI yang diterima oleh Pemerintah Provinsi antara lain disebabkan oleh :

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, pengendalian internal yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji materi;
- 2) Pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan keuangan tahun 2025 telah dilaksanakan dengan efektif.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Target Nilai Akuntabilitas Kinerja

Target nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 adalah Predikat A (>80-90) dengan realisasi sebesar Predikat B (61,62) atau mencapai 77,02-68,44%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 63,68 (B) maka



terjadi penurunan sebesar 2,06 poin atau turun sebesar -3,34%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPD Predikat A (>80-90), maka terdapat gap sebesar 18,38-28.38 poin.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja
Realisasi nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Dokumen perencanaan di level pusat maupun rencana strategis PD perlu dilakukan reuiu, hal ini karena rumusan kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya berorientasi outcome sesuai level kinerja Gubernur dan Kepala Dinas. Selain itu rumusan kinerja yang ada belum sepenuhnya menjawab isu sgtrategis yang dihadapi atau tugas serta fungsi organisasi.
- 2) Indikator kinerja sebagian besar yang belum sepenuhnya kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound* (SMART) serta cukup untuk mengukur dan menggambarkan ketercapaian kinerja baik di level provinsi maupun perangkat daerah.
- 3) Belum seluruh target pada indikator yang terdapat pada RPJMD disertai dengan *baseline*, sehingga belum diketahui dasar penentuan target 5 tahun mendatang apakah sudah tepat dan terukur.
- 4) Ditemukan praktik penetapan target kinerja dalam bentuk *range* (rentang nilai). Penggunaan rentang target ini membuat arah pencapaian kinerja menjadi kurang terukur, tidak menunjukkan tingkat ambisi yang jelas, dan berpotensi menurunkan akurasi pengendalian serta akuntabilitas capaian kinerja.
- 5) Aktivitas dalam rencana aksi maupun dokumen perencanaan masih didominasi oleh daftar kegiatan rutin. Aktivitas tersebut belum menggambarkan intervensi strategis yang diperlukan untuk mendorong pencapaian sasaran hasil, sehingga kontribusinya terhadap perbaikan kinerja menjadi terbatas
- 6) Penyusunan rencana aksi masih berorientasi pada penggunaan

anggaran, bukan pada langkah aksi substantif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pada level kinerja di atasnya. Rencana aksi yang disusun belum menggambarkan tahapan perubahan yang perlu dilakukan untuk mendorong pencapaian outcome, sehingga fungsi rencana aksi sebagai alat kendali kinerja menjadi kurang optimal.

- 7) Penjenjangan/cascading kinerja yang telah disusun belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi
- 8) SAKIP di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dipandang sebagai urusan beberapa unit tertentu seperti Bapperida, Bagian Organisasi, atau Inspektorat dan belum dianggap sebagai tanggung jawab seluruh perangkat daerah atau seluruh pegawai
- 9) Masih ditemukan indikator kinerja yang belum dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, serta sumber dan penanggung jawab data yang memadai. Selain itu, IKU level pusat dan sebagian perangkat daerah masih mengacu pada dokumen perencanaan lama, sehingga definisi operasional, formulasi perhitungan, serta sumber dan penanggung jawab data untuk kinerja utama yang baru belum ditetapkan secara jelas
- 10) Masih ditemukan kesalahan dalam penggunaan unit ukur pada indikator kinerja. Ketidaktepatan unit ukur ini menyebabkan hasil pengukuran menjadi tidak akurat dan menimbulkan risiko salah tafsir terhadap capaian kinerja
- 11) Belum seluruh Perangkat Daerah melakukan unggah monev rencana aksi secara berkala, sehingga akuntabilitas pelaksanaan rencana aksi dan keterlacakan tindak lanjutnya belum dapat dipastikan secara memadai

- 12) Dalam mekanisme pengukuran berkala, instansi belum melakukan identifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat pencapaian kinerja secara detail. Ketiadaan analisis ini mengakibatkan proses pemantauan tidak menghasilkan pembelajaran yang dapat digunakan untuk perbaikan maupun penyesuaian strategi secara berkelanjutan
- 13) Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya
- 14) Perlu penyeragaman kualitas laporan kinerja seluruh PD. Hal ini karena sebagian laporan kinerja PD belum menyampaikan informasi analisa yang memadai yaitu terkait perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan benchmark, analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014
- 15) Evaluator internal pada belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai metodologi evaluasi kinerja. Keterbatasan ini menyebabkan proses evaluasi kurang tajam, tidak konsisten dengan prinsip evaluasi berbasis hasil, dan berisiko menghasilkan analisis yang tidak akurat sebagai dasar pengambilan keputusan
- 16) Terdapat ketidaksesuaian antara hasil evaluasi internal dengan LHE eksternal Perbedaan ini menunjukkan bahwa evaluasi internal belum mampu mencerminkan kondisi kinerja secara objektif atau belum menggunakan standar penilaian yang konsisten dengan metodologi evaluasi eksternal. Akibatnya, evaluasi internal tidak dapat berfungsi sebagai *early warning system* bagi instansi.

Adapun solusi dari faktor-faktor penghambat tercapainya target perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan reviu dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan di level pusat dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk memastikan rumusan kinerja telah berorientasi pada *outcome* sesuai dengan level kinerja Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah, serta secara langsung menjawab isu strategis dan tugas fungsi organisasi
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan pada seluruh indikator agar memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, and time bound (SMART) serta cukup untuk mengukur dan menggambarkan ketercapaian kinerja baik di level provinsi maupun PD
- 3) Belum seluruh target pada indikator yang terdapat pada rancangan akhir RPJMD disertai dengan baseline, sehingga belum diketahui dasar penentuan target 5 tahun mendatang apakah sudah tepat dan terukur
- 4) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur disarankan meninjau kembali indikator dan target yang masih menggunakan rentang nilai, kemudian mengonversinya menjadi target tunggal sesuai kapasitas dan kondisi kinerja. Target harus ditetapkan pada satu nilai yang mencerminkan ambisi peningkatan kinerja serta memungkinkan dilakukan evaluasi capaian secara objektif
- 5) Meninjau kembali aktivitas yang telah disusun dan menyesuaikannya agar mencerminkan langkah-langkah strategis yang mendukung pencapaian outcome. Aktivitas yang terlalu administratif atau rutin perlu digeser menjadi aksi yang memiliki nilai tambah terhadap capaian kinerja
- 6) Menyusun rencana aksi yang berorientasi pada pencapaian outcome, dengan memastikan setiap rencana aksi dirumuskan sebagai langkah perubahan substantif yang secara logis mendorong pencapaian sasaran kinerja pada level di atasnya, serta tidak semata-mata berfokus pada penggunaan anggaran

- 7) Melakukan penyesuaian terhadap penjenjangan/cascading kinerja agar mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF), sehingga memenuhi prinsip logis, menggambarkan hubungan sebab akibat, serta mencerminkan pemecahan masalah sesuai kondisi yang dihadapi.
- 8) Instansi perlu menegaskan bahwa implementasi SAKIP merupakan tanggung jawab seluruh pimpinan dan pegawai, bukan hanya unit teknis tertentu. Setiap PD dan setiap level jabatan harus memiliki peran jelas dalam siklus perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja. Pimpinan wajib memastikan kepemilikan SAKIP melekat pada seluruh struktur organisasi
- 9) Menetapkan dan melengkapi seluruh indikator kinerja dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data, dan penanggung jawab data yang jelas, serta melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama level pusat dan perangkat daerah agar sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan terbaru
- 10) Melakukan perbaikan pada penggunaan satuan ukur pada seluruh indikator kinerja agar sesuai dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan yang ditetapkan, sehingga hasil pengukuran kinerja akurat dan tidak menimbulkan salah tafsir terhadap capaian kinerja
- 11) Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan unggah monitoring dan evaluasi rencana aksi secara berkala guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan rencana aksi serta keterlacakan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut
- 12) Mewajibkan pelaksanaan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja secara sistematis dan terstruktur dalam setiap pengukuran berkala, serta mendokumentasikan hasil analisis tersebut sebagai dasar pembelajaran dan penyesuaian strategi kinerja secara berkelanjutan

- 13) Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan, agar penetapan target kinerja tidak lebih rendah dari realisasi kinerja tahun sebelumnya
- 14) Perlu dilakukan penyeragaman kualitas laporan kinerja seluruh PD sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, terutama dalam penyajian analisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan benchmark, analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja
- 15) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur disarankan memperkuat kapasitas evaluator internal dengan memberikan pemahaman yang memadai mengenai metodologi evaluasi kinerja. Penguatan ini penting agar proses evaluasi menghasilkan analisis menjadi tajam, konsisten dengan prinsip evaluasi berbasis hasil, dan menghasilkan analisis yang akurat sebagai dasar pengambilan Keputusan
- 16) Menyelaraskan metodologi, kriteria, dan standar penilaian evaluasi internal dengan kerangka evaluasi eksternal. Evaluasi internal harus mampu mencerminkan kondisi kinerja secara objektif dan menggunakan standar penilaian yang konsisten dengan metodologi evaluasi eksternal. Sehingga evaluasi internal dapat berfungsi sebagai *early warning system* bagi instansi

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Capaian Target Indeks SPBE

Target nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada RPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebesar 2,5 poin dengan realisasi sebesar 3,89*) poin. Namun pada Tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran karena Tahun 2025 merupakan masa transformasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi), sehingga tidak dilakukan evaluasi oleh Kementerian

terkait di Tahun 2025 terhadap daerah-daerah yang terpilih termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk persiapan evaluasi Pemerintahan Digital yang akan dilakukan mulai Tahun 2026.

Arah kebijakan nasional Transformasi Tata Kelola dilaksanakan dengan strategi Transformasi Digital Pemerintah (TDP). Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola pada periode Tahun 2025-2029 difokuskan untuk pencapaian Asta Cita, di mana pelaksanaan TDP berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi). Target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup). Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan target akhir RPD karena akan ada penambahan variabel penilaian pada Indeks Pemerintahan Digital.

5. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

a. Capaian Target Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Target Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 sebesar 90 poin, dengan realisasi sebesar 93,30 poin dengan predikat Informatif atau mencapai 103,66% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 94,30, maka capaian terjadi penurunan sebesar 1 poin atau -1,07%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 95, maka capaian tingkat keterbukaan informasi publik hanya terpaut 1,7 poin dari target akhir RPD.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi target nilai indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 mencapai target, hal

ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya upaya daerah untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka terus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memasukkan indikator Tingkat Keterbukaan Informasi Publik ke dalam salah satu indikator penunjang Pimpinan Perangkat Daerah sehingga meningkatkan keikutsertaan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Monev SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi di daerah.
- 2) Adanya keaktifan website PPID Utama, PPID pelaksana, website ntpprov dan media sosial masing-masing Perangkat Daerah dalam mempublikasikan secara rutin Program/Kegiatan untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik. Dengan mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik masyarakat bisa mengetahui pembangunan yang dilakukan pemerintah dan ikut ambil bagian dalam pembangunan tersebut. Selain itu, dengan publikasi, juga turut mendukung salah satu agenda pembangunan yaitu menjaga stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
- 3) Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama menjalankan fungsi kontrol, monitoring dan evaluasi dengan baik

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Capaian Target Indeks Kepuasan Masyarakat

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 sebesar 90 poin, dengan realisasi sebesar 87,12 poin atau 96,80%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 86,16 maka terjadi peningkatan sebesar 0,96 atau 1,10%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 90, maka terdapat gap sebesar 2,88 poin.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 tidak mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Jumlah Responden yang diperoleh Perangkat Daerah masih

sangat minim karena jumlah responden sangat mempengaruhi nilai indeks kepuasan masyarakat di Perangkat Daerah tersebut.

- 2) Total nilai perunsur masih sangat rendah karena merupakan hasil kompilasi penilai dari masyarakat atau tamu yang datang menilai pelayanan yang ada pada perangkat daerah tersebut.
- 3) Dari 9 unsur terdapat 4 unsur yang harus di tingkatkan atau di perbaiki adalah Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan, Kompetensi Petugas dalam Pelayanan, Kualitas Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan.

Adapun solusi dari faktor-faktor penghambat tercapainya target perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perangkat Daerah yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat harus lebih responsif dalam jumlah responden yang datang berkunjung.
- 2) Untuk memperbaiki nilai perunsur agar memenuhi target yang telah di tetapkan maka perangkat daerah harus memperbaiki pelayanan yang ada serta disesuaikan dengan unsur-unsur yang akan di nilai.
- 3) Perbaikan dan peningkatan dari tiap-tiap unsur dapat disesuaikan dengan mempedomani Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

7. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

a. Capaian Target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Target nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 adalah 82,4 dengan realisasi sebesar 79,47*). Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 83, maka terdapat gap sebesar 3.53 poin.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Realisasi nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025)* belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya jaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok Masyarakat.
- 2) Pemenuhan hak-hak pekerja berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena masih cukup banyak pekerja yang belum memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun.
- 3) Pers belum sepenuhnya bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 4) Masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan.
- 5) Masih ada monopoli sumber daya ekonomi.
- 6) Netralitas penyelenggara pemilu yang belum maksimal.
- 7) Belum sepenuhnya ada jaminan pemerintah/pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang terhadap Masyarakat.
- 8) Masih kurang transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/APBD oleh pemerintah.
- 9) Kinerja birokrasi dalam pelayanan public belum optimal.

Adapun solusi dari faktor-faktor penghambat tercapainya target perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut

- 1) Masyarakat dan lembaga pemerintah berkolaborasi dengan mengikuti dan menyelenggarakan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 2) Memberikan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun bagi para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Memperkuat regulasi kebebasan pers. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga, serta melindungi jurnalis dari ancaman dan intimidasi. Media juga harus dilindungi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan.
- 4) Memberikan ruang yang banyak bagi berpartisipasi dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan.

- 5) Para penyelenggara pemilu harus mentaati aturan hukum, kode etik, serta profesionalitas guna menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi Indonesia.
- 6) Belum sepenuhnya ada jaminan pemerintah/pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang terhadap Masyarakat.
- 7) Publikasi informasi anggaran baik APBN/APBD.
- 8) Meningkatkan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.
- 9) Memberikan pendidikan politik pada kader partai politik.

Analisis Program dan Anggaran Perangkat Daerah yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari Tujuan Keempat RPD yaitu **Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 33 program pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh 18 perangkat daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut perangkat daerah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.32
Jumlah Program, Jumlah dana (alokasi dan realisasi)
Menurut Perangkat Daerah

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
			(Rp.)	(Rp.)	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6.748.092.922	5.856.213.433	86,78
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.703.598.291	5.514.967.750	96,69
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	171.575.700	69.364.475	40,43
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.256.881.390	3.037.084.473	93,25
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	6.684.483.900	6.666.566.970	99,73



NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
			(Rp.)	(Rp.)	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	156.098.000	127.039.694	81,38
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	299.893.000	285.040.900	95,05
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penangan Konflik Sosial	1.172.220.700	735.176.048	62,72
3	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.771.558.731	3.635.088.790	96,38
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.990.678.238	2.940.177.686	98,31
4	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.116.212.600	1.098.772.495	98,44
		Program Kesejahteraan Rakyat	13.503.000.000	10.673.122.792	79,04
5	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1.588.012.265	1.524.239.950	95,98
6	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Program Perekonomian dan Pembangunan	634.252.900	628.995.828	99,17
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	149.356.860	148.283.560	99,28
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ	6.321.313.800	5.657.826.327	89,50
8	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Program Penataan Organisasi	1.155.715.095	1.064.984.021	92,15
9	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	847.499.925	836.467.548	98,69
10	Biro Umum Setda Provinsi NTT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.527.473.764	42.727.901.362	84,56



NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
			(Rp.)	(Rp.)	
11	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	92.459.638.300	88.910.693.988	96,16
12	Bapperida Provinsi NTT	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.059.399.249	2.022.447.718	66,11
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.740.039.950	2.391.707.465	87,29
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.633.083.628	1.523.426.497	93,29
13	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Program Kepegawaian Daerah	4.498.868.971	3.739.933.172	83,13
14	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	784.573.474.584	631.839.499.216	80,53
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.354.649.080	1.712.274.148	51,04
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.640.981.716	12.885.555.342	88,01
16	Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	Program Pengembangan SDM	12.280.954.954	10.319.440.162	84,03
17	Badan Penghubung Provinsi NTT	Program Pelayanan Penghubung	1.145.292.000	1.066.157.170	93,09
18	Badan Perbatasan Provinsi NTT	Program Pengelolaan Perbatasan	389.347.334	357.632.080	91,85
Jumlah			1.026.076.826.857	839.327.867.577	91,85

Sumber data: LKIP PD PROV. NTT 2025, diolah

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencaian sasaran strategis **“Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif Dan Kolaboratif”** sebesar **106,03 (Sangat Berhasil)**. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 33 program oleh 18 Perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.026.076.826.857,- dan



realisasi Rp839.327.867.577,- atau mencapai 91,85%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil mencapai sasaran strategis pada tujuan keempat RPD 2024-2026.

Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sesuai misi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.33
Capaian Tujuan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025

NO	TUJUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SKALA ORDINAL
1.	Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial	165,78	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing	98,47	Sangat Berhasil
3.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Mitigasi Bencana	84,89	Berhasil
4.	Mewujudkan Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	106,03	Sangat Berhasil
Rata-Rata Capaian		113,79	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pemprov NTT selama Tahun 2025 dikategorikan **Sangat Berhasil**. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian target 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 16 (enam belas) sasaran dari 4 (empat) Tujuan.

3.2 Capaian Dasa Cita

Meskipun Gubernur dan Wakil Gubenur Periode 2025-2029 dilantik setelah anggaran 2025 ditetapkan namun berbagai program Dasa Cita telah dilaksanakan sejak tahun 2025 melalui mekanisme perubahan anggaran. Untuk itu dalam LKIP tahun 2025 juga dilaporkan capaian Program Dasa Cita yang telah dilaksanakan.

Implementasi Dasa Cita 1 tentang hilirisasi ekonomi dan ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong transformasi sistem pertanian melalui pendekatan terintegrasi “Tanam–Panen–Olah–Kemas–Jual” guna mengubah pola produksi konvensional menjadi berbasis nilai tambah dan berorientasi pasar. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat sektor hulu melalui peningkatan produktivitas, tetapi juga mengoptimalkan sektor hilir melalui pengolahan, pengemasan, dan perluasan akses distribusi, termasuk melalui ekspansi jaringan NTT Mart di 21 kabupaten/kota serta 1 kabupaten dalam proses pembentukan.

Capaian produksi pangan strategis tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya produksi beras sebesar 560.446 ton atau naik 35,19 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 418.812 ton), menjadi indikator konkret keberhasilan kebijakan ini dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Dasa Cita 2 dan 3 terkait Pemberdayaan Lokal dan Penguatan Pariwisata, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara konsisten mendorong pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta promosi potensi daerah melalui berbagai program strategis. Melalui kegiatan Inkubasi bisnis milenial dan perempuan, pelatihan teknis dan manajerial telah menjangkau lebih dari 1.200 peserta di berbagai kabupaten sebagai upaya memperkuat kewirausahaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan *Tour de EnTeTe* dan berbagai event budaya, termasuk balap sepeda sejauh 1.541 km, menjadi instrumen promosi terpadu untuk mengangkat potensi alam dan destinasi pariwisata Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional maupun internasional. Selaras dengan itu, Gerakan Beli NTT terus digalakkan sebagai kampanye strategis untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap produk lokal sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Wujud implementasi Dasa Cita 4, 5, dan 6, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat perlindungan sosial, layanan kesehatan dasar, serta akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Pada Dasa Cita 4, program perlindungan pekerja informal telah menjangkau 100.000 pekerja

rentan yang terdiri dari petani, nelayan, dan pelaku UMKM dengan dukungan investasi premi sebesar Rp10,08 miliar serta cakupan di 22 kabupaten/kota guna memastikan keberlanjutan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui Dasa Cita 5, dilakukan transformasi posyandu tangguh dengan revitalisasi peran posyandu sebagai garda terdepan penurunan stunting dan peningkatan cakupan imunisasi, yang diperkuat melalui intervensi kesehatan konvergen lintas sektor. Sementara itu, pada Dasa Cita 6, pemerintah mendorong penguatan sektor pendidikan melalui bantuan siswa miskin bagi 1.124 siswa, pembangunan 11 asrama sekolah vokasi unggulan, pemberian insentif bagi 1.515 guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan kurikulum berbasis potensi daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian target RPD Tahun 2025 dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan.

Implementasi Dasa Cita 7 yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar guna mewujudkan Nusa Tenggara Timur Sejahtera, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat akses masyarakat terhadap perumahan layak huni, listrik, dan infrastruktur jalan. Melalui APBD-P Tahun 2025, dialokasikan bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni sebanyak 51 unit dengan nilai Rp20.000.000 per unit yang tersebar di beberapa kabupaten (Kabupaten Sumba Timur 2 Unit, Kabupaten Sumba Barat Daya 9 Unit, Kabupaten Ende 10 Unit, Kabupaten Sumba Barat 4 Unit, Kabupaten Manggarai 10 Unit, Kabupaten Ngada 6 Unit dan Kabupaten Manggarai Timur 10 Unit), sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Di sektor kelistrikan, dilakukan pemasangan meteran listrik bagi 842 kepala keluarga guna mendorong peningkatan rasio elektrifikasi di berbagai wilayah prioritas. Sementara itu, pada penanganan infrastruktur jalan, dialokasikan anggaran sebesar Rp96,53 miliar untuk 33 paket pekerjaan dengan total penanganan sepanjang 46,92 km serta pemeliharaan rutin 58,35 km. Intervensi ini berdampak pada peningkatan kondisi jalan provinsi, dimana ruas jalan dalam kondisi mantap meningkat dari 1.827,07 km pada tahun 2024 menjadi 1.873,861 km pada tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat konektivitas wilayah dan pemerataan pembangunan di seluruh Nusa Tenggara Timur.

Implementasi Dasa Cita 8, 9, dan 10, Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur terus mendorong transformasi birokrasi, penguatan tata kelola digital, serta perluasan jejaring strategis global. Pada Dasa Cita 8, komitmen peningkatan kualitas layanan publik diwujudkan melalui penyelesaian 100% pengaduan “Meja Rakyat” dengan total 429 pengaduan yang telah ditindaklanjuti, serta reformasi SDM berbasis kompetensi guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Pada Dasa Cita 9, penguatan NTT *Smart Province* direalisasikan melalui inovasi Portal Satu Data/Portal Sasando sebagai platform integrasi data sektoral untuk perencanaan pembangunan yang akurat dan terpadu, capaian Indeks SPBE sebesar 3,89 (Sangat Baik) yang memperoleh *Digital Government Award 2024*, serta digitalisasi layanan di 39 puskesmas pada 11 kabupaten/kota guna meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Sementara itu, pada Dasa Cita 10, perluasan konektivitas dengan lebih dari 150 diaspora di tingkat nasional dan 12 negara menjadi langkah strategis dalam menarik investasi, memperkuat jejaring kolaborasi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta pengembangan daerah secara berkelanjutan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan memuat tentang analisis penggunaan sumber daya keuangan yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Efektivitas penggunaan anggaran

1. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi enggaran belanja dengan Target anggaran belanja. Menurut keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efektivitas belanja sebagai berikut:
 - a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
 - b. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
 - c. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
 - d. Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.

- e. Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Tabel 3.34
Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran pada 34 Perangkat Daerah dan 1 Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Tahun 2025

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.549.106.034.264	2.012.257.314.781	78,94	Kurang Efektif
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	195.420.828.481	160.309.974.419	82,03	Cukup Efektif
3	Dinas Kesehatan	524.346.754.381	440.833.840.632	84,07	Cukup Efektif
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	193.368.808.591	177.784.776.072	91,94	Efektif
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.265.095.982	11.311.038.315	92,22	Efektif
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.010.785.793	11.048.605.369	91,99	Efektif
7	Dinas Sosial	59.117.744.366	54.364.615.505	91,96	Efektif
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.198.052.094	15.519.295.634	73,21	Kurang Efektif
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	93.560.648.295	80.804.984.825	86,37	Cukup Efektif
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.527.163.382	4.652.344.989	84,17	Cukup Efektif
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.886.022.258	21.249.174.591	88,96	Cukup Efektif
12	Dinas Perhubungan	32.562.745.961	29.886.239.740	91,78	Efektif
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.849.862.757	19.318.423.775	88,41	Cukup Efektif
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.898.195.031	9.762.623.200	82,05	Cukup Efektif



No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
15	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	30.628.780.358	28.151.733.654	91,91	Efektif
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.804.443.165	7.145.903.156	91,56	Efektif
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	40.997.321.972	39.547.962.449	96,46	Efektif
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.940.850.264	11.374.996.251	87,90	Cukup Efektif
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.170.815.487	18.928.448.411	85,38	Cukup Efektif
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21.242.722.686	18.049.951.498	84,97	Kurang Efektif
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.870.873.275	64.173.790.938	84,58	Cukup Efektif
22	Dinas Peternakan	36.360.037.492	29.822.294.136	82,02	Cukup Efektif
23	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	15.169.719.195	14.141.706.172	93,22	Efektif
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.936.485.615	19.812.641.051	60,15	Tidak Efektif
25	Sekretariat Daerah	124.979.898.946	105.565.832.986	84,47	Cukup Efektif
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	172.866.355.010	166.747.071.048	96,46	Efektif
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	23.192.418.127	19.688.223.519	84,89	Cukup Efektif
28	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	109.977.808.054	81.385.896.167	74,00	Kurang Efektif
29	Badan Keuangan Daerah	804.327.916.077	648.368.819.470	80,61	Cukup Efektif



No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
30	Badan Kepegawaian Daerah	14.484.392.894	12.807.148.813	88,42	Cukup Efektif
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.382.408.858	22.458.161.110	85,13	Cukup Efektif
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.867.723.763	5.268.562.166	89,79	Cukup Efektif
33	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	12.006.812.278	10.702.507.140	89,14	Cukup Efektif
34	Inspektorat Daerah	20.065.064.672	19.238.353.316	95,88	Efektif
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.523.342.170	15.201.926.568	92,00	Efektif
JUMLAH		5.382.914.931.994	4.407.685.181.866	81,88	Cukup Efektif

2. Efisiensi penggunaan anggaran

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total anggaran belanja. Menurut keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja kurang efisien.
- Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
- Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
- Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

Tabel 3.35
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran 34 Perangkat Daerah
dan 1 Rumah Sakit Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi Tahun 2025

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.549.106.034.264	2.012.257.314.781	78,94	Efisien
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	195.420.828.481	160.309.974.419	82,03	Cukup Efisien
3	Dinas Kesehatan	524.346.754.381	440.833.840.632	84,07	Cukup Efisien
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	193.368.808.591	177.784.776.072	91,94	Kurang Efisien
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.265.095.982	11.311.038.315	92,22	Kurang Efisien
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.010.785.793	11.048.605.369	91,99	Kurang Efisien
7	Dinas Sosial	59.117.744.366	54.364.615.505	91,96	Kurang Efisien
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.198.052.094	15.519.295.634	73,21	Efisien
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	93.560.648.295	80.804.984.825	86,37	Cukup Efisien
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.527.163.382	4.652.344.989	84,17	Cukup Efisien
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.886.022.258	21.249.174.591	88,96	Cukup Efisien
12	Dinas Perhubungan	32.562.745.961	29.886.239.740	91,78	Kurang Efisien
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.849.862.757	19.318.423.775	88,41	Cukup Efisien
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.898.195.031	9.762.623.200	82,05	Cukup Efisien
15	Dinas Ketenagakerjaan	30.628.780.358	28.151.733.654	91,91	Kurang Efisien



No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
	Dan Transmigrasi				
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.804.443.165	7.145.903.156	91,56	Kurang Efisien
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	40.997.321.972	39.547.962.449	96,46	Kurang Efisien
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.940.850.264	11.374.996.251	87,90	Cukup Efisien
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.170.815.487	18.928.448.411	85,38	Cukup Efisien
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21.242.722.686	18.049.951.498	84,97	Cukup Efisien
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.870.873.275	64.173.790.938	84,58	Cukup Efisien
22	Dinas Peternakan	36.360.037.492	29.822.294.136	82,02	Cukup Efisien
23	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	15.169.719.195	14.141.706.172	93,22	Kurang Efisien
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.936.485.615	19.812.641.051	60,15	Efisien
25	Sekretariat Daerah	124.979.898.946	105.565.832.986	84,47	Cukup Efisien
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	172.866.355.010	166.747.071.048	96,46	Kurang Efisien
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	23.192.418.127	19.688.223.519	84,89	Cukup Efisien
28	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	109.977.808.054	81.385.896.167	74,00	Efisien
29	Badan Keuangan Daerah	804.327.916.077	648.368.819.470	80,61	Cukup Efisien
30	Badan Kepegawaian Daerah	14.484.392.894	12.807.148.813	88,42	Cukup Efisien
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.382.408.858	22.458.161.110	85,13	Cukup Efisien



No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
	Daerah				
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.867.723.763	5.268.562.166	89,79	Cukup Efisien
33	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	12.006.812.278	10.702.507.140	89,14	Cukup Efisien
34	Inspektorat Daerah	20.065.064.672	19.238.353.316	95,88	Kurang Efisien
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.523.342.170	15.201.926.568	92,00	Kurang Efisien
JUMLAH		5.382.914.931.994	4.407.685.181.866	81,88	Cukup Efisien

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 terlihat ada 15 indikator kinerja yang **SANGAT BERHASIL**, dan 1 indikator kinerja **CUKUP BERHASIL**, sebagaimana dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Capaian Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SKALA ORDINAL
1.	Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera Dan Berkeadilan Sosial	165,78	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Beserta Pengolahan Produk Untuk Meningkatkan Nilai Tambah"	112,97	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Peranan Pariwisata Untuk Mendukung Perekonomian"	743,34	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Investasi Dan Neraca Perdagangan"	144,44	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 4 "Terciptanya Lapangan Kerja Dan Meningkatkan Kesempatan Kerja"	68,08	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 5 " Meningkatkan Daya Beli Masyarakat"	90,39	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 6 "Menurunnya Kemiskinan Masyarakat"	96,67	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 7 "Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antara Kelompok Masyarakat"	102,42	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 8 "Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah"	96,05	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 9 "Terjaminnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak, Disabilitas Dan Inklusi Sosial"	99,76	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 10 "Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan"	103,71	Sangat Berhasil

2.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	98,47	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM Nusa Tenggara Timur yang Berdaya Saing"	99,78	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan"	97,16	Sangat Berhasil
3.	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayaan Dan Mitigasi Bencana	84,89	Berhasil
	Sasaran Strategis 1 "Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar"	91,46	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah"	106,28	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Lingkungan"	56,93	Cukup Berhasil
4.	Tujuan : Mewujudkan Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	106,03	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis"	106,03	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN		113,79	SANGAT BERHASIL

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTT (LKIP) berupa penyajian indikator-indikator sasaran strategis beserta analisisnya bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan, guna menyusun perencanaan serta langkah-langkah cepat dan strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka mendorong realisasi pencapaian kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Mendorong pencapaian indikator pada sasaran strategis yang belum berhasil, cukup berhasil dan berhasil untuk menjadi sangat berhasil;
2. Memberi dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha;
3. Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan karena mengalami hambatan;
4. Melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan-terobosan baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur dengan dukungan Pemerintah Pusat.

